



LAPORAN TAHUNAN 2025

PT. BPR LUMBUNGARTHA
MUNTILANINDO



Daftar Isi

Daftar Isi	<i>i</i>
Kata Pengantar	<i>ii</i>
Ikhtisar Utama	<i>ii</i>
I. Laporan Manajemen	1
Laporan Direksi	1
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris	8
II. Profil Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif	14
III. Kepemilikan	19
IV. Perkembangan Usaha	21
V. Analisis dan Pembahasan Manajemen	26
VI. Pengembangan Sumber Daya Manusia	36
VII. Laporan Keuangan Tahunan	48
VIII. Laporan dan Opini Akuntan Publik	57
Surat Pernyataan Kebenaran Laporan Keuangan Tahunan	58

Kata Pengantar

Laporan Tahunan 2025 ini merupakan ringkasan lengkap yang menampilkan pencapaian PT BPR Lumbungartha Muntilanindo sepanjang satu tahun, mulai 1 Januari 2025 hingga 31 Desember 2025. Laporan ini mencakup Laporan Keuangan Tahunan serta data umum Bank, disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan dan Pedoman Akuntansi yang berlaku bagi Bank Perekonomian Rakyat.

Tahun 2025 menandai fase penuh tantangan bagi dunia perbankan, termasuk bagi PT BPR Lumbungartha Muntilanindo. Meski begitu, perusahaan ini berhasil melewati periode tersebut dengan cukup baik dan mencatat pertumbuhan kinerja yang positif bila dibandingkan dengan tahun 2024.

Secara kinerja keuangan, Perseroan mencatatkan peningkatan total aset sebesar 8,55% dibandingkan tahun 2024. Penyaluran Kredit Yang Diberikan (KYD) naik 19,99%, menegaskan upaya ekspansi kredit yang konsisten. Di sisi penghimpunan dana, Dana Pihak Ketiga (DPK) tabungan turun 10,69% sementara deposito tumbuh 23,18%; secara keseluruhan, total DPK mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2024.

Permodalan Perseroan masih tetap pada tingkat yang sangat memadai, terwujud dari penurunan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) sebesar 19,07% menjadi 50,17% (2025) dibandingkan 61,99% (2024). Sementara itu, laba tahun berjalan meningkat sebesar 85,10% dibandingkan dengan tahun sebelumnya walaupun masih negatif.

Dari perspektif kualitas aset, rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) menunjukkan perbaikan dengan penurunan sebesar 19,16% pada tahun 2024 menjadi 25,32% pada 31 Desember 2025. Meski demikian, tingkat NPL ini masih memerlukan perhatian khusus agar secara bertahap dapat ditekan menjadi lebih sehat sesuai ketentuan regulator.

Dalam menghadapi berbagai tantangan dan dinamika perubahan, Perseroan telah mengimplementasikan langkah-langkah strategis guna meningkatkan kinerja secara berkelanjutan. (*Good Corporate Governance*), dengan memperkuat penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, meningkatkan efektivitas Manajemen Risiko, serta menegakkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). PT BPR Lumbungartha Muntilanindo juga terus mendorong inovasi, efisiensi operasional, dan memperkuat kolaborasi di seluruh lini organisasi untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan.

Semua langkah strategis yang diambil difokuskan pada peningkatan peluang yang ada, mendorong pertumbuhan usaha berkelanjutan, dan menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan PT BPR Lumbungartha Muntilanindo.

PT. BPR LUMBUNGARTHA MUNTILANINDO

Laporan Keuangan Tahunan 2025

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Kredit yang Diberikan	Rp 24.864.652.803
Pendapatan Operasional	Rp 5.581.233.772
Beban Operasional	Rp 5.788.138.771
Pendapatan Non Operasional	Rp 29.700.000
Beban Non Operasional	Rp 25.228.240
Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan	-Rp 202.433.239

Rasio Keuangan

KPMM 50,17%	NPL Neto 25,32%	NPL Gross 28,85%	ROA -0,75%
BOPO 103,70%	NIM 8,68%	LDR 115,46%	Cash Ratio 17,81%



I. Laporan Manajemen

1. Laporan Direksi

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Pertama-tama, perkenalkan kami mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan karunia- Nya, sehingga PT BPR Lumbungartha Muntilanindo berhasil melalui tahun 2025 yang terus berkembang dinamis dan penuh ketidakpastian dengan pertumbuhan dan kinerja yang cukup baik. Pencapaian ini sejalan dengan visi dan misi BPR Lumbungartha Muntilanindo untuk menyediakan solusi perbankan bagi masyarakat khususnya nasabah Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mendorong sektor usaha di daerah Magelang dan sekitarnya._

Strategi dan Kebijakan Strategis BPR

Sepanjang 2025, BPR Lumbungartha Muntilanindo tetap optimis namun berhati-hati dalam meningkatkan portofolio pinjaman sejalan dengan dinamika lingkungan usaha. Kami senantiasa disiplin dalam melakukan ekspansi kredit dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian Bank di tengah kondisi tantangan Industri BPR yang mengalami penurunan kualitas kredit, khususnya pada pinjaman ritel, baik Usaha Mikro dan Kecil maupun konsumtif.

Dalam mendukung pertumbuhan, BPR Lumbungartha Muntilanindo juga memperkuat penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) melalui peningkatan kepuasan nasabah, keunggulan dan inovasi produk dan optimalisasi program marketing dana. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia menjadi prioritas melalui peningkatan kompetensi di bidang pemasaran dan analisis kredit, layanan prima serta manajemen risiko. BPR Lumbungartha Muntilanindo terus memperkuat penerapan tata kelola (GCG), kepatuhan terhadap regulasi dan peningkatan pemahaman terhadap model bisnis calon debitur yang hendak diakuisisi. Upaya ini dilakukan untuk memastikan keberlangsungan usaha BPR tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, arah kebijakan strategis BPR Lumbungartha Muntilanindo pada tahun 2025 difokuskan pada pencapaian pertumbuhan yang berkualitas (quality growth), memperluas basis nasabah dan penetrasi pasar secara selektif, menjaga rasio kredit bermasalah pada level yang terkendali, peningkatan efisiensi operasional melalui optimalisasi proses bisnis dan pemanfaatan teknologi, serta penguatan daya saing melalui inovasi produk dan layanan prima. BPR Lumbungartha Muntilanindo juga tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan memperkuat tata kelola perusahaan dan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan regulator.



Direksi berperan dalam membentuk strategi dan kebijakan BPR Lumbungartha Muntilanindo untuk memastikan keselarasan dengan Visi dan Misi Bank. Direksi menetapkan arah strategis yang jelas dan berkolaborasi dengan semua unit bisnis untuk mengembangkan rencana bisnis yang komprehensif, serta didukung oleh perangkat pendukung utama seperti kepegawaian, teknologi, infrastruktur, dan manajemen risiko.

Untuk mendorong pelaksanaan yang efektif, Direksi menetapkan target yang terukur dan tercermin pada indikator kinerja utama (KPI - Key Performance Indicator) serta memastikan keselarasan pelaksanaan inisiatif di seluruh unit bisnis. Implementasi strategi dipantau melalui monitoring berkala dan komunikasi berkelanjutan dengan unit kerja bisnis, fungsi pendukung, cabang, dan kantor kas. Penyesuaian akan dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika pasar. Direksi juga mendorong budaya dan nilai-nilai perusahaan untuk memperkuat kerja sama tim dan memastikan pelaksanaan Rencana Bisnis Bank yang efektif. Kami optimis bahwa pertumbuhan kredit dan skala usaha BPR Lumbungartha Muntilanindo dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan melalui penerapan strategi yang tepat sasaran melalui eksekusi bisnis yang disiplin.

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Sepanjang tahun buku 2025, PT BPR Lumbungartha Muntilanindo menunjukkan kinerja yang membaik dari tahun sebelumnya. Namun jika dibandingkan dengan RBB Desember 2025 masih banyak yang belum mencapai rencana. Berikut tabel perbandingan Rencana dan Realisasi per 31 Desember 2025:

-



Keterangan	Rencana 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2025	LEBIH/ KURANG
CAR	34.08%	50.17%	16.09%
LDR	113.91%	115.46%	1.55%
Cash Ratio (CR)	20.93%	17.81%	-3.12%
KAP	19.93%	22.57%	2.64%
ROA	0.37%	-0.75%	-1.12%
ROE	1.29%	-3.17%	-4.46%
BOPO	98.29%	103.70%	5.41%
NPL bruto	25.92%	28.85%	2.93%
PPAP / PPAPWD	100.00%	100.00%	0.00%
NPL Net	22.28%	25.32%	3.04%
Interest Margin	12.64%	8.68%	-3.96%
BTK / P.Bunga Kredit	82.21%	79.78%	-2.43%
BTK / P.Operasional	53.90%	42.70%	-11.20%
RR	46.57%	52.69%	6.12%

Kendala, Tantangan dan Antisipasinya

Sepanjang tahun 2025, BPR Lumbungartha Muntilanindo masih menghadapi dinamika perekonomian, serta meningkatnya persaingan likuiditas dan iklim usaha yang belum kondusif. Dalam kondisi tersebut, BPR Lumbungartha Muntilanindo memfokuskan strategi penyaluran kredit pada pertumbuhan yang berkualitas melalui pendalaman ekosistem bisnis, penguatan disiplin risiko, serta optimalisasi kapabilitas yang telah dibangun pada periode sebelumnya.

Sebagai langkah antisipasi, BPR Lumbungartha Muntilanindo menjalankan beberapa inisiatif utama sebagai berikut:

1. Penyempurnaan proses kredit, mulai dari pencarian calon debitur hingga proses akad kredit.
2. Meningkatkan kualitas kredit eksisting dengan melakukan monitoring kredit yang ketat serta melakukan penanganan dini terhadap potensi kredit bermasalah.
3. Meningkatkan marketing funding untuk pertumbuhan DPK dalam rangka menopang ekspansi kredit, mempertebal NIM (Net Interest Margin) serta memperkuat likuiditas BPR Lumbungartha Muntilanindo.
4. Pengembangan Kompetensi SDM dengan mengikutsertakan pegawai dan direksi mengikuti pelatihan teknis perbankan dan seminar yang relevan dengan ekonomi dan perbankan
5. Peningkatan Kepatuhan dan Tata Kelola dengan memastikan seluruh kebijakan dan prosedur telah selaras dengan regulasi yang berlaku serta memperkuat fungsi pengawasan internal.



-

Penerapan Tata Kelola

Pada tahun 2025 BPR Lumbungartha Muntilanindo belum menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) sebagai landasan dalam menjalankan kegiatan usaha. Penerapan GCG diarahkan untuk memastikan pengelolaan Perseroan dilakukan secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan wajar. Namun karena adanya kekosongan pada bagian Audit Internal menyebabkan pengawasan internal belum berjalan efektif. Akibat dari kekosongan ini, BPR Lumbungartha Muntilanindo dalam hal pengawasan internal dilakukan oleh Direksi dan Komisaris.

-

Hasil Self Assessment terhadap 12 Faktor Penerapan Tata Kelola berada pada Peringkat Komposit 2 (Baik). Hal ini menunjukkan Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.

Dengan penerapan tata kelola yang baik, BPR Lumbungartha Muntilanindo berupaya menjaga kepercayaan pemangku kepentingan serta mendukung pertumbuhan usaha yang sehat dan berkelanjutan.

-

Penerapan Manajemen Risiko

BPR Lumbungartha Muntilanindo menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi sebagai bagian penting dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan usaha. Penerapan ini dilakukan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Perseroan, sesuai dengan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dan ketentuan regulator.

Manajemen risiko di BPR Lumbungartha Muntilanindo mencakup seluruh jenis risiko utama, antara lain risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas dan risiko kepatuhan, risiko . Dalam implementasinya, BPR Lumbungartha Muntilanindo mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan serta melakukan evaluasi secara berkala guna memastikan efektivitas pengendalian risiko yang selaras dengan pengaturan yang telah ditetapkan oleh OJK.

Direksi bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko secara menyeluruh, sementara Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Untuk mendukung hal tersebut, BPR Lumbungartha Muntilanindo juga memperkuat fungsi manajemen risiko dan pengendalian internal, termasuk melalui penerapan Risk and Control Self Assessment (RCSA) serta pemantauan profil risiko secara berkala.



Dalam pengelolaan risiko kredit, Perseroan menerapkan prinsip kehati-hatian melalui proses analisis kredit yang komprehensif, pemantauan kualitas aset, serta upaya penanganan dini terhadap potensi kredit bermasalah. Sementara itu, dalam pengelolaan risiko operasional, BPR Lumbungartha Muntilanindo terus meningkatkan efektivitas sistem dan prosedur kerja guna meminimalkan potensi kesalahan dan gangguan operasional. Sedangkan dari sisi mitigasi risiko kepatuhan, BPR Lumbungartha Muntilanindo tunduk pada regulasi OJK, memenuhi kewajiban pelaporan dan komitmen yang telah dibuat dengan OJK.

Hasil Penilaian Profil Risiko pada Semester II 2025 menunjukkan bahwa Profil Risiko BPR Lumbungartha Muntilanindo termasuk dalam peringkat 2 (rendah) dan memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:

1. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari rata-rata tingkat Risiko inheren tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.
2. Rata-rata tingkat KPMR memadai. Dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen.

Melalui penerapan manajemen risiko yang efektif dan berkelanjutan, BPR Lumbungartha Muntilanindo optimis dapat menjaga kinerja yang sehat, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, serta mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

-

Tingkat Kesehatan Bank

BPR Lumbungartha Muntilanindo secara rutin melakukan penilaian terhadap risiko dan kinerja Bank melalui pelaksanaan self assessment Tingkat Kesehatan Bank (TKB) dengan menggunakan pendekatan risiko (Risk-Based Bank Rating) dan cakupan penilaian terhadap faktor profil risiko (risk profile), penerapan tata kelola (good corporate governance), rentabilitas (earning) dan permodalan (capital).

Self-Assessment TKB dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan OJK No. 3/POJK.03/2022 tanggal 04 Maret 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS dan Surat Edaran OJK No. 11/SEOJK.03/2022 tanggal 18 Juli 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS, dengan hasil akhir berupa Peringkat Komposit (PK).

Hasil Self-Assessment Tingkat Kesehatan BPR Lumbungartha Muntilanindo secara Individu posisi 31 Desember 2025 berada pada Peringkat Komposit 2 (PK-2). Hal ini mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain, tercermin dari peringkat faktor penilaian tersebut antara lain profil risiko, penerapan Tata Kelola, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum sangat baik. Dalam hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.



Pengendalian Internal dalam Proses Pelaporan Keuangan Bank

BPR Lumbungartha Muntilanindo melaksanakan sistem pengendalian internal dalam proses Pelaporan Keuangan Bank untuk meningkatkan integritas pelaporan keuangan Bank sebagaimana yang diamanatkan dalam POJK No. 15 Tahun 2024. Pengendalian Internal dalam Proses Pelaporan Keuangan BPR Lumbungartha Muntilanindo bertujuan untuk: (1) memastikan kebenaran, keakuratan, dan transparansi atas Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan; (2) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional dalam proses pelaporan keuangan; (3) Memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses pelaporan keuangan; dan (4) Memastikan Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencatatan transaksi keuangan.

Pengendalian Internal dalam Pelaporan Keuangan (PIPKu) dilaksanakan agar Informasi Keuangan dan/ atau Laporan Keuangan semakin berintegritas. Terselenggaranya sistem pengendalian internal Bank yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab Direksi. Selain itu, manajemen Bank juga berkewajiban untuk meningkatkan budaya sadar risiko (risk awareness) yang efektif pada organisasi Bank dan memastikan hal tersebut melekat di setiap jenjang organisasi serta melaksanakan penilaian terhadap pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank sesuai dengan pasal 8 ayat (3) POJK No. 15 Tahun 2024.

BPR Lumbungartha Muntilanindo juga telah menyusun Laporan PIPKu Tahun 2025 dan melaporkannya ke OJK sebagai bagian dari Laporan Tahunan 2025. Laporan PIPKu BPR Lumbungartha Muntilanindo dimaksud memuat:

1. Laporan Pengujian Atas Pos-pos pada Laporan Keuangan apakah sudah wajar dan dicatat sesuai dengan POJK yang mengatur tentang Pencatatan Transaksi dan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK-EP)
2. Self Assessment Pengendalian Internal dalam Proses Pelaporan Keuangan Bank menggunakan 5 Komponen COSO dalam ICoFR (Internal Control over Financial Reporting) yaitu penilaian sendiri (self assessment) terhadap 5 (lima) komponen pengendalian COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) yaitu: (1) Lingkungan Pengendalian; (2) Penilaian Risiko; (3) Aktivitas Pengendalian; (4) Informasi dan Komunikasi; dan (5) Pemantauan.

Apresiasi dan Penutup

Direksi BPR Lumbungartha Muntilanindo menyampaikan terima kasih kepada Dewan Komisaris atas bimbingan, arahan, dan pengawasan yang diberikan dalam menjalankan tugas operasional sehari-hari. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada para pemegang saham dan nasabah atas kepercayaan yang telah diberikan, yang memungkinkan BPR Lumbungartha Muntilanindo untuk terus tumbuh secara signifikan dan berkelanjutan, serta mencatatkan kinerja operasional dan keuangan yang solid di tengah tantangan dan ketidakpastian. Kami juga berterima kasih kepada regulator serta seluruh pemangku kepentingan lainnya atas



dukungan dan kerja sama yang terjalin dengan baik sepanjang 2025.

Tidak lupa, kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pegawai atas dedikasi dan kerja kerasnya, yang memungkinkan BPR Lumbungartha Muntilanindo untuk terus berkembang dan mewujudkan visi serta misi yang kita emban bersama. Kinerja baik pada tahun 2025 menjadi landasan bagi pencapaian yang semakin kokoh di tahun-tahun mendatang.

Akhir kata, kepada seluruh nasabah dan mitra kerja, merupakan suatu kebanggaan bagi kami, keluarga besar PT BPR Lumbungartha Muntilanindo, untuk senantiasa dapat melayani serta memenuhi harapan Anda. BPR Lumbungartha Muntilanindo berkomitmen untuk terus menyediakan produk dan layanan, baik dalam penghimpunan dana maupun penyaluran kredit, yang selaras dengan perkembangan skala usaha serta memenuhi pembiayaan untuk kebutuhan konsumtif nasabah.



2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Pemegang Saham dan Para Pemangku Kepentingan yang Kami Hormati,

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Komisaris menyampaikan Laporan Pengawasan atas pengelolaan Bank untuk tahun buku 2025. Di tengah kondisi ekonomi dan dunia usaha yang belum kondusif, BPR Lumbungartha Muntilanindo mampu menjaga ketahanan kinerja dan stabilitas usaha melalui disiplin eksekusi strategi serta pengelolaan risiko yang pruden.

Laporan Dewan Komisaris mencakup penilaian atas kinerja Direksi dalam mengelola perusahaan beserta pengawasan terhadap perumusan dan implementasi strategi oleh Direksi; pandangan atas prospek usaha BPR Lumbungartha Muntilanindo; serta pengawasan terhadap penerapan tata kelola perusahaan dan kinerja struktur organ tata kelola.

Pelaksanaan Tugas Pengawasan

Selama tahun buku 2025, Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Direksi, antara lain:

1. Pengawasan atas Kinerja Direksi dengan memantau pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (RBB), mengevaluasi pencapaian kinerja keuangan dan operasional dan memberikan arahan strategis dalam pengembangan usaha
2. Pengawasan atas Penerapan Tata Kelola (GCG) dengan memastikan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran serta menilai efektivitas pelaksanaan fungsi kepatuhan, audit internal, dan manajemen risiko
3. Pengawasan Manajemen Risiko dengan mengawasi implementasi manajemen risiko, termasuk risiko kredit, operasional, likuiditas, dan kepatuhan serta mengevaluasi laporan profil risiko BPR Lumbungartha Muntilanindo secara berkala
4. Pengawasan terhadap Sistem Pengendalian Internal termasuk Pengendalian Internal dalam Proses Pelaporan Keuangan Bank, menilai kecukupan sistem pengendalian internal (internal control) dan mengawasi tindak lanjut temuan audit internal dan eksternal telah diselesaikan secara tuntas
5. Memastikan Kepatuhan terhadap Regulasi dan pemenuhan kepatuhan (comply with) menyampaikan pelaporan terhadap seluruh ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan penyelesaian seluruh komitmen yang dibuat BPR dengan regulator.

-

Frekuensi dan Mekanisme Rapat

Selama tahun buku 2025, Dewan Komisaris PT BPR Lumbungartha Muntilanindo telah melaksanakan rapat secara berkala sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan Perseroan.

Sepanjang periode tersebut, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 4 (**empat**) kali **Rapat Dewan Komisaris**. Selain itu, dalam rangka memperkuat koordinasi dan sinergi dengan



Direksi, telah dilaksanakan 7 **(tujuh) kali Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi.**

Pelaksanaan rapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perseroan, dengan agenda yang mencakup antara lain evaluasi kinerja, pembahasan strategi bisnis, pengawasan penerapan tata kelola, serta pemantauan profil risiko Perseroan.

Dewan Komisaris menilai bahwa pelaksanaan rapat sepanjang tahun 2025 telah berjalan secara efektif dan optimal. Hal ini tercermin dari tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris yang tinggi, terselenggaranya rapat secara rutin dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, pembahasan agenda yang komprehensif dan relevan dengan kondisi Perseroan, Tercapainya pengambilan keputusan yang tepat waktu dan berkualitas, adanya tindak lanjut yang memadai atas setiap rekomendasi dan hasil rapat

Dengan demikian, rapat Dewan Komisaris telah berfungsi secara efektif dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan serta memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik di lingkungan PT BPR Lumbungartha Muntilanindo.

-

Agenda rapat meliputi:

1. Evaluasi kinerja keuangan dan operasional
2. Pembahasan laporan hasil pemeriksaan OJK
3. Pemantauan risiko dan kepatuhan
4. Persetujuan kebijakan strategis tertentu

-

Rekomendasi kepada Direksi

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris telah memberikan berbagai rekomendasi kepada Direksi, antara lain:

1. Peningkatan kualitas kredit dan penurunan NPL
2. Penguatan sistem pengendalian internal
3. Peningkatan kualitas SDM dan kompetensi
4. Penguatan infrastruktur teknologi informasi
5. Peningkatan kepatuhan terhadap regulasi

Seluruh rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Direksi secara memadai.

Penilaian atas Kinerja Direksi

Penilaian kinerja Direksi berdasarkan kepatuhan dalam menjalankan pedoman kinerja Direksi dan pelaksanaan RBB. Penilaian ini dibahas dalam rapat Dewan Komisaris yang diadakan triwulanan. Kedepan, Dewan Komisaris mendorong Direksi untuk terus meningkatkan kinerja melalui penguatan strategi bisnis, penerapan manajemen risiko yang lebih efektif, serta optimalisasi peluang pertumbuhan yang ada, guna memastikan keberlanjutan usaha PT BPR Lumbungartha Muntilanindo.



Penilaian dan Evaluasi Dewan Komisaris terhadap Prospek Bisnis

Dewan Komisaris memandang prospek usaha BPR ke depan cukup menantang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi makro dan regional yang belum tumbuh secara signifikan dan masih perlu fokus pada penjualan kredit yang berkualitas, perbaikan kolektibilitas kredit, peningkatan DPK, peningkatan kompetensi pegawai dan penguatan permodalan secara organik.

Dewan Komisaris memberikan dukungan terhadap prospek bisnis tahun 2026 yang disampaikan oleh Direksi, yang dinilai telah mencerminkan pendekatan yang seimbang antara optimalisasi peluang usaha dan penerapan mitigasi risiko yang memadai.

Dewan Komisaris juga mendukung kebijakan Direksi dalam menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) dengan menggunakan asumsi yang realistis dan terukur, sehingga target yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian.

Selain itu, Dewan Komisaris merekomendasikan agar Direksi senantiasa menjaga kecukupan permodalan dan likuiditas sebagai fondasi utama dalam menghadapi dinamika lingkungan usaha yang terus berkembang, serta untuk memastikan keberlangsungan usaha Bank secara sehat dan berkelanjutan.

Pengawasan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Salah satu tugas Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS adalah untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran dalam setiap kegiatan usaha BPR Lumbungartha Muntilanindo di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi.

Bahwa bisnis perbankan merupakan bisnis yang berdasarkan kepercayaan (trust) dari nasabah, sehingga penerapan tata kelola yang baik menjadi faktor penting untuk menjaga dan/atau memelihara kepercayaan dari nasabah, pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan hasil penilaian sendiri atas 12 Faktor Tata Kelola posisi 31 Desember 2025, BPR Lumbungartha Muntilanindo memiliki Peringkat Komposit 2 (Baik) dan Peringkat Komposit (PK) ini agar dipertahankan atau dapat ditingkatkan.

Pengawasan Pengendalian Internal dalam Proses Pelaporan Keuangan Bank

Mengacu pada POJK No. 15 Tahun 2024 tanggal 09 Oktober 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank pada Pasal 9 ayat (1) dan (3) dengan substansi bahwa Dewan Komisaris BPR wajib melakukan pengawasan atas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank dan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris BPR



dimaksud dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis Bank (P2RBB) secara semesteran sesuai dengan POJK mengenai RBB BPR dan BPRS.

Berdasarkan pengawasan Dewan Komisaris terhadap penerapan Kebijakan dan Prosedur Pengendalian Internal dalam Proses Pelaporan Keuangan Bank Tahun 2025 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Direksi telah melaksanakan tanggung jawabnya dalam menyusun dan menyajikan Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan ketentuan OJK mengenai pencatatan transaksi keuangan;
2. Sesuai dengan Laporan Pengendalian Internal untuk Meningkatkan Integritas Pelaporan Keuangan (PIPKu) Bank tahun 2025 yang diterima oleh Dewan Komisaris yang berisi tentang: a. Hasil Penilaian Sendiri Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan (PIPKu) yang dilakukan oleh Direksi dengan Peringkat 1 (Memadai) dan b. Laporan Hasil Pengujian atas Pos-Pos Laporan Keuangan Posisi 30 Juni 2025 yang telah disiapkan oleh Unit atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pencegahan kecurangan atau manipulasi dalam Informasi Keuangan dan/atau Laporan Keuangan Bank (hasil pengolahan data dan analisis dari SI-PIPKu),
3. Maka Dewan Komisaris memastikan bahwa BPR telah melaksanakan pengendalian internal yang efektif dalam proses pelaporan Keuangan Bank pada tahun 2025;
4. Tidak terdapat tindakan yang dengan sengaja dilakukan dengan tujuan memberikan keuntungan kepada yang bersangkutan atau pihak lain;
5. Tidak terdapat penekanan atau intervensi ke Bank dari pihak manapun yang menyebabkan kesalahan saji dalam Informasi Keuangan atau Laporan Keuangan Bank dan/atau kelemahan signifikan dalam proses pelaporan keuangan Bank.

-

Pengawasan Penerapan Kepatuhan

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa fungsi kepatuhan Bank telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 44 ayat (6) huruf a POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR dan BPR Syariah. Pengawasan dilakukan secara aktif dengan:

1. mengevaluasi penerapan fungsi kepatuhan secara berkala antara lain melalui pembahasan dalam rapat Dewan Komisaris;
2. memberikan saran dan arahan kepada Direksi untuk meningkatkan kualitas penerapan fungsi kepatuhan;
3. memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan termasuk pemenuhan komitmen kepada otoritas.

-

Pengawasan Penerapan Program APU PPPT dan PPPSPM

Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT dan PPPSPM) merupakan program yang wajib diterapkan dalam melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah dan pengguna jasa Bank (Nasabah atau Walk In Customer) yang dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan



Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 8 tahun 2023 tentang penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM) di Sektor Jasa Keuangan pada tanggal 14 Juni 2023.

Dewan Komisaris telah memastikan bahwa penerapan program APU PPT dan PPPSPM di BPR Lumbungartha Muntilanindo telah berjalan dengan baik dengan melaksanakan upaya pencegahan dan memitigasi risiko Bank digunakan oleh pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) sebagai sarana melakukan kejahatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara operasional dalam penerapannya, Unit Kerja dan seluruh tingkatan pegawai pada BPR telah mengacu pada Standar Operasional Prosedur APU PPT dan PPPSPM.

Berdasarkan Self Assessment terhadap Penilaian Risiko TPPU, TPPT dan PPSPM atau Laporan IRA (Individual Risk Assessment) posisi 31 Desember 2025 yang dilaporkan ke OJK dan Laporan IRA dimaksud ditembuskan ke Dewan Komisaris, menunjukkan bahwa Tingkat Risiko PT BPR Lumbungartha Muntilanindo berada pada Peringkat Rendah (1) dengan karakteristik antara lain sebagai berikut:

1. Dengan mempertimbangkan pencegahan dan mitigasi yang dilakukan BPR, kemungkinan risiko TPPU, TPPU dan PPPSPM yang dihadapi PT BPR Lumbungartha Muntilanindo dari Risiko inheren rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.
2. KPPA (Kualitas Penerapan Program APU PPT dan PPPSPM) PT BPR Lumbungartha Muntilanindo cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen dan perbaikan.

Pengawasan Penerapan Strategi Anti Fraud

Mengacu pada POJK No. 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud (SAF) Bagi Lembaga Jasa Keuangan, PT BPR Lumbungartha Muntilanindo selaku Lembaga Jasa Keuangan (OJK) telah memiliki Standar Prosedur Operasional Penerapan Strategi Anti Fraud yang mengacu pada POJK No. 12 Tahun 2024. SOP tersebut merupakan wujud komitmen manajemen PT BPR Lumbungartha Muntilanindo dalam mencegah terjadinya fraud dengan menerapkan suatu sistem pengendalian fraud yang dijalankan secara efektif dan berkesinambungan. Sistem pengendalian fraud ini mengarahkan BPR Lumbungartha Muntilanindo dalam menentukan langkah- langkah untuk mencegah, mendeteksi, menginvestigasi, dan memantau atas kejadian fraud.

Dewan Komisaris memastikan penerapan 4 (empat) pilar Penerapan Strategi Anti Fraud yaitu Pencegahan, Deteksi, Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi, serta Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut melalui Laporan Pelaksanaan Strategi Anti Fraud Semester I dan 2 Tahun 2025 yang berisi Self Assessment terhadap 4 (empat) Pilar yang dilaporkan per semester ke OJK dan ditembuskan ke Dewan Komisaris.

Dari hasil evaluasi terhadap laporan tersebut disimpulkan bahwa penerapan 4 (empat) pilar Strategi Anti Fraud secara umum telah dilaksanakan secara memadai, namun perlu lebih dioptimalkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dewan Komisaris memberikan saran/ nasihat kepada Direksi agar:

- 1.



Seluruh Kepala Unit Kerja agar senantiasa menerapkan fungsi pengawasan/kontrol (mulai dari maker, checker sampai dengan approval) secara ketat dan penuh tanggung jawab sebagai upaya meningkatkan pengendalian internal untuk menjaga BPR Lumbungartha Muntilanindo agar tidak terjadi fraud baru sesuai prinsip “Zero Tolerance”, yang berdampak pada penilaian KPI per Individu.

2. Sosialisasi dan peningkatan risk awareness untuk mencegah agar tidak terjadi potensi risiko Fraud. BPR agar berkomitmen untuk melakukan sosialisasi atau kampanye kesadaran mengenai anti fraud, termasuk anti penyuapan dan anti korupsi melalui penyelenggaraan dan pertemuan rutin di internal pegawai minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

Penutup Dewan Komisaris

Dewan Komisaris PT BPR Lumbungartha Muntilanindo menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Direksi dan seluruh karyawan atas kinerja, komitmen, dan dedikasi yang telah ditunjukkan sepanjang tahun buku 2025.

Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah melaksanakan pengelolaan Perseroan secara baik, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, serta manajemen risiko yang efektif dalam menghadapi dinamika industri perbankan.

Ke depan, Dewan Komisaris berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas fungsi pengawasan secara independen dan objektif, guna memastikan bahwa setiap kebijakan dan strategi yang dijalankan Perseroan sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik serta mendukung pertumbuhan usaha yang sehat dan berkelanjutan.

Dewan Komisaris juga akan senantiasa memperkuat sinergi dengan Direksi dalam rangka menciptakan nilai tambah (value added) bagi seluruh pemangku kepentingan.



II. Profil Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif

1. Data Direksi dan Dewan Komisaris

1.	Nama	MIA BUDY SETYAGRAHA
	Alamat	JL. JLAGRAN NO.7B 024/006 PRINGGOKUSUMAN GEDONGTENGGEN YOGYAKARTA
	Jabatan	Komisaris Utama
	Tanggal Mulai Menjabat	19 Desember 2022
	Tanggal Selesai Menjabat	19 Desember 2027
	Nomor SK Persetujuan Otoritas	S-43/KR.0313/2023
	Tanggal SK Persetujuan Otoritas	31 Januari 2023
	Pendidikan Terakhir	S2
	Tanggal Kelulusan	13 Maret 1999
	Nama Lembaga Pendidikan	THE OHIO STATE UNIVERSITY COLOMBUS USA
	Pendidikan Non Formal Terakhir	SERTIF KOMISARIS
	Tanggal Pelatihan	15 Mei 2023
	Lembaga Penyelenggara	LEMBAGA
	Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang Berlaku	Ya
	Tanggal Berakhir Masa Berlakunya Sertifikat Kompetensi Kerja	15 Mei 2028



2.	Nama	RADEN DIONESIUS ANTO WIDIYATMOKO
	Alamat	PURI SEWON ASRI E 22 002/000 PANGGUNGHARJO SEWON BANTUL
	Jabatan	Komisaris
	Tanggal Mulai Menjabat	28 Mei 2024
	Tanggal Selesai Menjabat	28 Mei 2029
	Nomor SK Persetujuan Otoritas	S-229/KR.0313/2019
	Tanggal SK Persetujuan Otoritas	25 Juni 2019
	Pendidikan Terakhir	S2
	Tanggal Kelulusan	17 September 2022
	Nama Lembaga Pendidikan	UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG
	Pendidikan Non Formal Terakhir	SERTIF KOMISARIS
	Tanggal Pelatihan	02 Oktober 2023
	Lembaga Penyelenggara	LEMBAGA
	Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang Berlaku	Ya
	Tanggal Berakhir Masa Berlakunya Sertifikat Kompetensi Kerja	02 Oktober 2028



3.	Nama	BUDHI ROCHMADI
	Alamat	WATES TENGAH RT/RW 003/002 WATES MAGELANG UTARA
	Jabatan	Direktur
	Tanggal Mulai Menjabat	18 Juli 2025
	Tanggal Selesai Menjabat	18 Juli 2030
	Nomor SK Persetujuan Otoritas	SR-7/KO.1323/2025
	Tanggal SK Persetujuan Otoritas	15 Juli 2025
	Pendidikan Terakhir	S1
	Tanggal Kelulusan	20 Juli 1991
	Nama Lembaga Pendidikan	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
	Pendidikan Non Formal Terakhir	SERTIF DIREKTUR
	Tanggal Pelatihan	28 Desember 2022
	Lembaga Penyelenggara	LEMBAGA
	Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang Berlaku	Ya
	Tanggal Berakhir Masa Berlakunya Sertifikat Kompetensi Kerja	28 Desember 2027



4.	Nama	FITRI ADI NUGROHO, S. E.
	Alamat	LOJAJAR 004/022 SINDUHARJO NGANGLIK SLEMAN
	Jabatan	Direktur Utama
	Tanggal Mulai Menjabat	18 Juli 2025
	Tanggal Selesai Menjabat	18 Juli 2030
	Nomor SK Persetujuan Otoritas	SR-7/KO.1323/2025
	Tanggal SK Persetujuan Otoritas	15 Juli 2025
	Pendidikan Terakhir	S1
	Tanggal Kelulusan	09 Maret 2002
	Nama Lembaga Pendidikan	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
	Pendidikan Non Formal Terakhir	SERTIF DIREKTUR
	Tanggal Pelatihan	22 April 2024
	Lembaga Penyelenggara	LEMBAGA
	Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang Berlaku	Ya
	Tanggal Berakhir Masa Berlakunya Sertifikat Kompetensi Kerja	22 April 2027

**2. Data Pejabat Eksekutif**

1.	Nama	ALBERTHA DAISY ARYA PALUPI
	Alamat	JL. RUDAL BLOK K6 RT 005 RW 010 JOGIN I JOGONEGORO MERTOYUDAN MAGELANG
	Jabatan	Pejabat Eksekutif Lainnya
	Tanggal Mulai Menjabat	22 April 2024
	Surat Pengangkatan No.	039/LAM/SK-DIR/SDM/I
	Surat Pengangkatan Tanggal	22 April 2024
2.	Nama	DANTIK MULIANANDASARI PRATIWI
	Alamat	DUSUN PRINGTALI 001/002 JOGONEGORO MERTOYUDAN
	Jabatan	Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko, Pejabat Eksekutif APU dan PPT
	Tanggal Mulai Menjabat	22 April 2024
	Surat Pengangkatan No.	040/LAM/SK-DIR/SDM/I
	Surat Pengangkatan Tanggal	22 April 2024
3.	Nama	DANANG SRI WIDADI, SE., MM
	Alamat	MENDUNGAN UH 7/562 RT 32 RW 11 GIWANGAN UMBULHARJO YOGYAKARTA
	Jabatan	Pejabat Eksekutif Lainnya
	Tanggal Mulai Menjabat	03 November 2025
	Surat Pengangkatan No.	063/LAM/SK-DIR/SDM/X
	Surat Pengangkatan Tanggal	03 November 2025



III. Kepemilikan

Daftar Kepemilikan

1.	Nama	HJ RAEHANA FATIMAH
	Alamat	JL. KYAI MOJO 14 014/004 014/004
	Jenis Pemilik	Perorangan
	Status Pemegang Saham	Non PSP
	Jumlah Nominal	Rp1.628.000.000
	Persentase Kepemilikan	22,00%
2.	Nama	YUDHISTIRA
	Alamat	BESOLE PANGGUNGAN 006/034 TRIHANGGO GAMPING SLEMAN
	Jenis Pemilik	Perorangan
	Status Pemegang Saham	Non PSP
	Jumlah Nominal	Rp1.628.000.000
	Persentase Kepemilikan	22,00%
3.	Nama	MIA BUDY SETYAGRAHA
	Alamat	JL. JLAGRAN NO.7B 24/06 PRINGGOKUSUMAN GEDONGTENGEN
	Jenis Pemilik	Perorangan
	Status Pemegang Saham	PSP
	Jumlah Nominal	Rp4.070.000.000
	Persentase Kepemilikan	55,00%
4.	Nama	NUNING SETYOWATI
	Alamat	NGLEMPONGSARI NO.135 009/027 SARIHARJO NGAGLIK
	Jenis Pemilik	Perorangan
	Status Pemegang Saham	Non PSP
	Jumlah Nominal	Rp74.000.000
	Persentase Kepemilikan	1,00%



Daftar Ultimate Shareholder

1.	Nama Ultimate Shareholder	MIA BUDY SETYAGRAHA
-----------	---------------------------	----------------------------



IV. Perkembangan Usaha

1. Riwayat Pendirian BPR

Informasi Umum Pendirian BPR	
Nomor akta pendirian	45
Tanggal akta pendirian	18 Agustus 1990
Tanggal mulai beroperasi	20 Agustus 1990
Nomor perubahan anggaran dasar terakhir	44
Tanggal perubahan anggaran dasar terakhir	18 Juli 2025
Nomor pengesahan dari instansi yang berwenang	AHU-AH.01.09-0313727
Tanggal pengesahan dari instansi yang berwenang	21 Juli 2025
Bidang usaha sesuai anggaran dasar	Perseroan Terbatas
Tempat kedudukan	Jalan Pemuda No 16, RT 003, RW 010, Desa Pucungrejo, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah
Hasil Audit Akuntan Publik	
Opini Akuntan Publik	01. Wajar Tanpa Pengecualian
Nama Akuntan Publik	Indarto dan Yudhika

Berdasarkan akta Notaris Djejem Widjaya, S.H., notaris di Yogyakarta, perseroan didirikan dengan nama PT BPR Artha Kencana dengan akta Nomor 45 tanggal 18 Agustus 1990, dan anggaran dasarnya diubah berdasarkan akta nomor 44 tanggal 17 Januari 1991 dan akta Nomor 39 tanggal 23 April 1991. Ketiga akta mengenai anggaran dasar tersebut dibuat dihadapan Djejem Widjaya, S.H., notaris di Yogyakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dengan Kutipan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-1575 HT.01.010.Th 91 tanggal 8 Mei 1991. Kemudian pada tahun 2008, perseroan ini berubah nama menjadi PT. Bank Perkreditan Rakyat Lumbungartha Muntilanindo melalui Akta Nomor 01 tanggal 1 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Irwan Santosa, S.H., Notaris di Jakarta, dan mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor



AHU-54826.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 25 Agustus 2008. Berdasarkan Akta No. 195 tanggal 30 Oktober 2023, yang dibuat dihadapan Notaris Justicia Eka Puspita, S.H., M.Kn., notaris di Sleman, dan telah mendapatkan pengesahan dari Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- AHA.01.09-0185129 pada tanggal 15 November 2023, Perseroan berganti menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntilanindo. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa perubahan dan yang terakhir Akta Notaris No 44 tanggal 18 Juli 2025 notaris Justicia Eka Puspita S.H., M.KN., notaris di Sleman dan telah mendapatkan pengesahan dari Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0313727 pada tanggal 21 Juli 2025.

2. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Dalam Ribuan Rupiah

Keterangan	Nominal
Pendapatan Operasional	5.581.234
Beban Operasional	5.788.139
Pendapatan Non Operasional	29.700
Beban Non Operasional	25.228
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak	-202.433
Taksiran Pajak Penghasilan	0
Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan	-202.433

PT. BPR LUMBUNGARTHA MUNTILANINDO mencatat Pendapatan Operasional sebesar Rp5,5 miliar dan Beban Operasional sebesar Rp5,7 miliar, menghasilkan defisit operasional sebelum pajak sebesar Rp-202,4 juta. Pendapatan Non Operasional tercatat Rp29,7 juta, sementara Beban Non Operasional sebesar Rp25,2 juta menambah beban tambahan pada periode ini. Dengan tidak adanya taksiran pajak penghasilan, total Laba (Rugi) Tahun Berjalan tetap berada pada angka negatif Rp-202,4 juta, menandakan kinerja keuangan yang masih berada di zona kerugian untuk tahun berjalan. Analisis ini menegaskan perlunya strategi peningkatan efisiensi operasional dan diversifikasi pendapatan untuk memperbaiki profitabilitas di tahun-tahun mendatang.

3. Kualitas Aset Produktif dan Rasio Keuangan

Kualitas Aset Produktif

Dalam Ribuan Rupiah

Keterangan	Lancar	DPK	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
------------	--------	-----	---------------	-----------	-------	--------



Surat Berharga	-	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal	-	-	-	-	-	-
Penempatan pada Bank Lain	4.756.310	-	-	-	-	4.756.310
Kredit yang Diberikan	-	-	-	-	-	-
a. Kepada BPR	-	-	-	-	-	-
b. Kepada Bank Umum	-	-	-	-	-	-
c. Kepada Nonbank - Pihak Terkait	-	-	-	-	-	-
d. Kepada Nonbank - Pihak Tidak Terkait	13.731.681	3.959.259	617.330	713.115	5.843.269	24.864.653
Jumlah Aset Produktif	18.487.990	3.959.259	617.330	713.115	5.843.269	29.620.963

Rasio Keuangan

Keterangan

Nilai Rasio

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM)	50,17
Rasio Cadangan terhadap PPKA	55,94
NPL Neto	25,32
NPL Gross	28,85
Return on Assets (ROA)	-0,75
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	103,70
Net Interest Margin (NIM)	8,68
Loan to Deposit Ratio (LDR)	115,46
Cash Ratio	17,81

Rasio keuangan PT. BPR LUMBUNGARTHA MUNTILANINDO menunjukkan KPM berada di atas batas minimum dengan 50,17 %, namun NPL gross sebesar 28,85 % dan BOPO melebihi 100 % (103,70 %) menandakan efisiensi operasional yang masih perlu ditingkatkan. ROA negatif (-0,75 %) mencerminkan tantangan profitabilitas, sementara NIM yang relatif tinggi (8,68 %) menunjukkan margin bunga yang masih kuat. LDR sebesar 115,46 % mengindikasikan



penggunaan dana yang agresif, dan cash ratio 17,81 % memperlihatkan likuiditas yang memadai. Secara keseluruhan, bank perlu memperkuat penagihan dan mengoptimalkan manajemen risiko untuk menurunkan NPL dan meningkatkan kinerja operasional.

4. Penjelasan NPL

Penjelasan, Penyebab, dan Langkah Penyelesaian NPL

NPL Gross (%)	28,85
---------------	--------------

NPL Neto (%)	25,32
--------------	--------------

Penyebab Utama Kondisi NPL:

Dalam periode 1 (satu) tahun terakhir, peningkatan rasio Non-Performing Loan (NPL) pada BPR Lumbungartha Muntilanindo dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang berasal dari sisi debitur maupun kondisi internal bank.

Dari aspek pihak/debitur, NPL didominasi oleh debitur pada segmen usaha mikro dan kecil yang memiliki ketahanan usaha relatif terbatas terhadap perubahan kondisi ekonomi. Beberapa debitur mengalami penurunan kemampuan bayar akibat penurunan pendapatan dan arus kas usaha.

Berdasarkan sektor ekonomi, kredit bermasalah terutama berasal dari sektor perdagangan kecil, jasa, pertanian, dan usaha konsumtif, yang sangat sensitif terhadap fluktuasi daya beli masyarakat dan kondisi ekonomi lokal.

Ditinjau dari siklus usaha debitur, sebagian debitur berada pada fase penurunan usaha (downturn), khususnya akibat melemahnya permintaan pasar serta meningkatnya biaya operasional, yang berdampak pada terganggunya kemampuan pembayaran kewajiban kredit.

Dari sisi faktor internal bank, NPL dipengaruhi oleh masih perlunya penguatan pada proses analisis kredit, khususnya dalam penilaian kemampuan bayar debitur (repayment capacity), monitoring pasca pencairan kredit, serta ketepatan dalam segmentasi dan mitigasi risiko kredit.

BPR Lumbungartha Muntilanindo secara berkelanjutan melakukan upaya mitigasi melalui penguatan manajemen risiko kredit, perbaikan proses end-to-end credit, serta peningkatan kualitas monitoring dan penagihan guna menekan rasio NPL ke depan.

Langkah Penyelesaian:

Angka pencapaian NPL Gross pada Desember 2025 sebesar 28,85%. Angka NPL ini sangat menantang dan upaya untuk menyelesaikan kredit bermasalah selama tahun 2025 masih belum maksimal dan memerlukan tindakan perbaikan kolektibilitas dengan terlebih dahulu memetakan kemauan dan kemampuan bayar debitur yang menunggak untuk mengintensifkan penagihan, menjajaki penjualan agunan secara sukarela milik debitur yang bermasalah dan melakukan lelang jaminan.



5. Perkembangan Usaha yang Berpengaruh secara Signifikan dan Perubahan Penting Lain

Perkembangan Usaha yang Berpengaruh secara Signifikan

Selama tahun 2025 terjadi pertumbuhan yang cukup signifikan terutama pada pertumbuhan pendapatan operasional yang merupakan pendapatan bunga bersih ditambah pendapatan operasional lainnya yang mencapai 54,06% serta Beban operasional yang merupakan beban diluar beban bunga mencapai 16,66% juga pertumbuhan kredit mencapai 19,99%.



V. Analisis dan Pembahasan Manajemen

1. Tinjauan Perekonomian

Tinjauan Perekonomian

Tinjauan perekonomian di lingkungan BPR, dilihat dari pertumbuhan permintaan kredit yang meningkat, terlihat pada angka pertumbuhan kredit yang diberikan meningkat 19,99% dari tahun sebelumnya. peningkatan ini menjadi tantangan bagi BPR dalam meningkatkan Dana Pihak ketiga (DPK) dan memperkecil rasio NPL BPR Lumbungartha Muntilanindo.

Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian tahun 2025, industri BPR diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyaluran kredit secara selektif dan produktif, memperkuat manajemen risiko, khususnya risiko kredit dan likuiditas, mengembangkan layanan berbasis digital untuk meningkatkan daya saing serta memperluas jangkauan wilayah pemasaran untuk pembiayaan pada sektor produktif dan UMKM.

Langkah- langkah tersebut penting diambil oleh BPR Lumbungartha Muntilanindo untuk meningkatkan penjualan kredit dan menjaga kualitas kredit serta memupuk DPK di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih dalam rangka menjaga keberlanjutan usaha serta meningkatkan kontribusi BPR terhadap perekonomian daerah.

2. Strategi dan Kebijakan Manajemen

Strategi dan Kebijakan Dalam Pengembangan Usaha

Kinerja PT. BPR Lumbungartha Muntilanindo tahun 2025 merupakan hasil dari berbagai upaya perbaikan secara menyeluruh meliputi pelayanan, sistem kerja dan peningkatan pengetahuan Sumber Daya Manusia. Beberapa Strategi dan Kebijakan guna mewujudkan pengembangan usaha adalah sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan aktivitas operasional selalu berpedoman pada ketentuan perundang-undangan maupun ketentuan praktek terbaik dalam perbankan lainnya yang ditetapkan manajemen.
2. Meningkatkan integritas, kemampuan, pengetahuan, kedisiplinan, Jujur dan berdedikasi tinggi kepada pegawai perusahaan serta mentaati aturan dan kode etik perusahaan.
3. Meningkatkan kinerja secara tim yang solid serta menciptakan hubungan kekeluargaan yang kuat pada seluruh karyawan.
4. Terus melakukan pengembangan sistem dan aplikasi serta perangkat keras dalam upaya untuk mengikuti cepatnya perkembangan teknologi informasi.
5. Peningkatan efisiensi dalam segala aktifitas operasional dengan tidak mengurangi nilai nilai pelayanan kepada nasabah dan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian.
6. Mengupayakan secara konsisten peningkatan DPK (Dana Pihak Ketiga) khususnya dana Tabungan untuk menciptakan struktur pendanaan yang ideal dengan fokus pada dana murah (LCD - Low Cost Deposit) melalui strategi marketing dan membangun hubungan baik dengan nasabah serta akuisisi terhadap penabung- penabung baru melalui kerja sama



dengan sekolah-sekolah untuk meningkatkan saldo tabungan.

7. Meningkatkan penjualan kredit kepada nasabah baru dan juga eksisting yang layak dengan top up kredit. Meminta referral dari nasabah debitur yang memiliki rekan bisnis yang membutuhkan bantuan modal kerja.

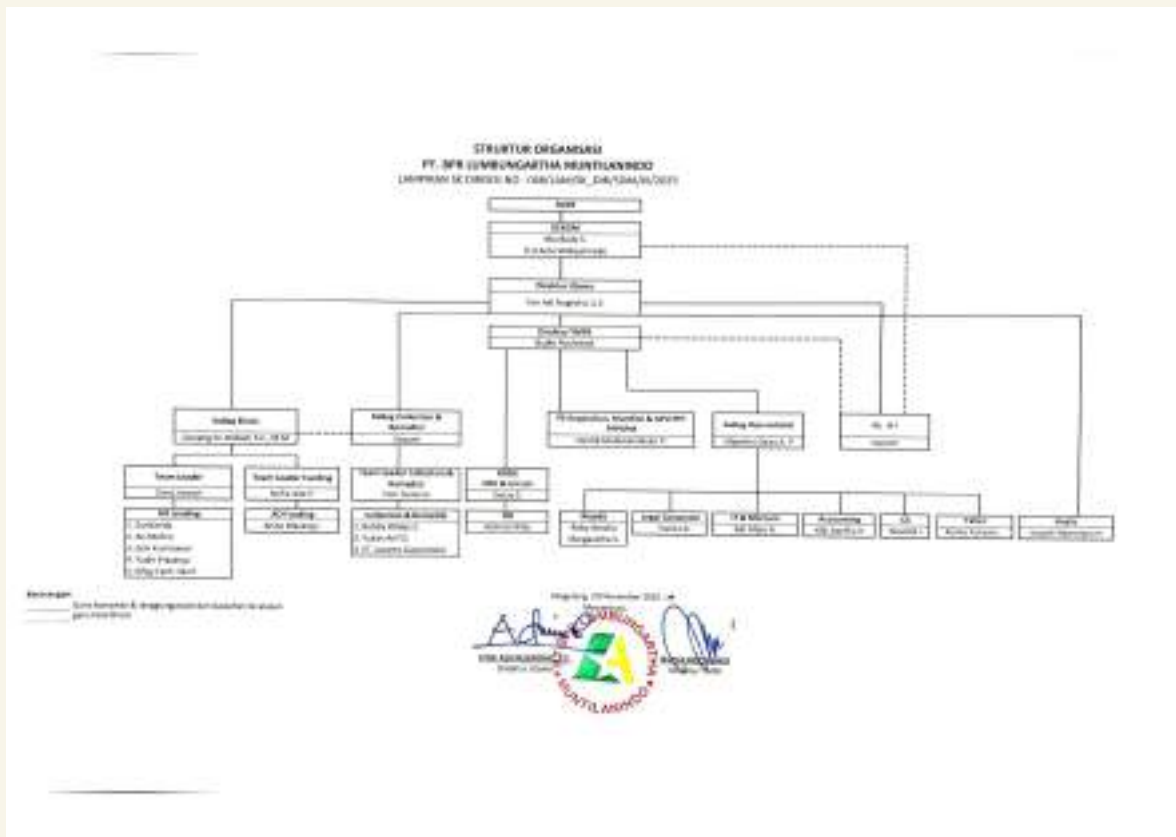
Strategi dan Kebijakan Dalam Manajemen Risiko

1. Memiliki kebijakan manajemen risiko yang menekankan pada pembentukan tata kelola manajemen risiko yang sehat dan menata penetapan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance). Limit risiko dievaluasi kembali sekali dalam 1 tahun atau lebih dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan.
2. Strategi untuk memitigasi kredit perlu dibuat panduan dan peta portofolio (portfolio guidance) sektor ekonomi yang memiliki prospek yang bagus dan yang sedang mengalami penurunan.
3. Melakukan analisa risiko pada beberapa sektor usaha yang dibiayai dan mengalami penurunan kinerja sehingga dapat dilakukan tindakan-tindakan preventif untuk meminimalisir risiko yang mungkin terjadi.
4. Untuk mengelola risiko operasional perlu dilakukan kajian dan pemantauan secara berkala atas sistem dan prosedur di BPR untuk menjaga serta mendukung kesinambungan operasional usaha Bank.



3. Struktur Organisasi

Diagram / Gambar Struktur Organisasi



Penjelasan Struktur Organisasi

Struktur organisasi PT BPR Lumbungartha Muntilanindo

4. Bidang Usaha

Bidang Usaha dan Produk BPR/BPRS

1.	Kategori Kegiatan Usaha	01. Penghimpunan Dana
	Jenis Produk	01. Produk dasar
	Nama Produk	Tabungan harian
	Uraian	Tabungan Harian yang bisa disetor dan penarikan sewaktu-waktu.
2.	Kategori Kegiatan Usaha	01. Penghimpunan Dana
	Jenis Produk	01. Produk dasar



	Nama Produk	Tabungan SIMAMAS
	Uraian	Tabungan arisan dengan setoran Rp 100.000 per bulan jangka waktu simpanan 24 bulan.
3.	Kategori Kegiatan Usaha	01. Penghimpunan Dana
	Jenis Produk	01. Produk dasar
	Nama Produk	Tabungan SIMAPAN
	Uraian	Tabungan arisan dengan setoran Rp 100.000 per bulan jangka waktu simpanan 12 bulan.
4.	Kategori Kegiatan Usaha	01. Penghimpunan Dana
	Jenis Produk	01. Produk dasar
	Nama Produk	Deposito
	Uraian	Deposito
5.	Kategori Kegiatan Usaha	01. Penghimpunan Dana
	Jenis Produk	01. Produk dasar
	Nama Produk	Deposito BERLIAN
	Uraian	Deposito berjangka dengan sistem bunga diberikan diawal periode.
6.	Kategori Kegiatan Usaha	02. Penyaluran Dana
	Jenis Produk	01. Produk dasar
	Nama Produk	Kredit Modal Kerja
	Uraian	Kredit Modal Kerja
7.	Kategori Kegiatan Usaha	02. Penyaluran Dana
	Jenis Produk	01. Produk dasar
	Nama Produk	Kredit Investasi
	Uraian	Kredit Investasi
8.	Kategori Kegiatan Usaha	02. Penyaluran Dana
	Jenis Produk	01. Produk dasar
	Nama Produk	Kredit Konsumtif
	Uraian	Kredit Konsumtif



5. Teknologi Informasi

Teknologi Informasi untuk Sistem Operasional

Dalam upaya untuk memberikan pelayanan kepada nasabah yang cepat, tepat dan akurat serta memenuhi kebutuhan informasi bagi manajemen, rencana pengembangan usaha serta informasi terkait dengan laporan kepada otoritas, kehandalan teknologi informasi menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting:

1. Sistem Operasional
 - a. Sistem operasional menggunakan Core Banking System PINtech dan bekerja sama dengan vendor Creva Business Consulting
 - b. Sistem Pelaporan ke Otoritas Jasa Keuangan meliputi :
 - SiPeduli untuk pengaduan Nasabah, Self Assesment, edukasi dan Inklusi
 - SLIK untuk Sistem Informasi Layanan Keuangan
 - APOLO untuk pelaporan kepada OJK
 - Sigap untuk pelaporan APU PPT
 - c. Sistem Aplikasi Sipesat Grips untuk PPATK
2. Sistem Keamanan
 - a. Untuk keamanan Data server ditempatkan diruangan khusus berpendingin udara yang hanya bisa diakses oleh pejabat yang ditunjuk.
 - b. Secara rutin dilakukan Back up data Mirroring dan back up data pada harddisk eksternal yang disimpan diruang khasanah.

Sistem Keamanan Teknologi Informasi

Dalam upaya untuk memberikan pelayanan kepada nasabah yang cepat, tepat dan akurat serta memenuhi kebutuhan informasi bagi manajemen, rencana pengembangan usaha serta informasi terkait dengan laporan kepada otoritas, kehandalan teknologi informasi menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting.

6. Perkembangan dan Target Pasar

Perkembangan dan Target Pasar

Guna mendukung rencana pengembangan usaha yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis harus didukung adanya suatu target yang terukur dan target pasar yang jelas. Langkah-langkah untuk pengembangan target pasar dilakukan dengan cara:

1. Meningkatkan jumlah nasabah dari beberapa wilayah yang selama ini sudah menjadi pasar BPR.
2. Memperluas wilayah pemasaran baru disekitar wilayah yang sudah ada.
3. Target pengembangan usaha dengan mencari peluang sektor ekonomi potensial yang ada di wilayah kerja

**7. Jumlah, Jenis, dan Lokasi Kantor****Daftar Jaringan Kantor**

1.	Nama Kantor	PT BPR LUMBUNGARTHA MUNTILANINDO
	Alamat	JL. PEMUDA NO.16 MUNTILAN
	Desa/Kecamatan	Pucungrejo
	Kabupaten/Kota	Kab. Magelang
	Kode Pos	56414
	Nama Pimpinan	FITRI ADI NUGROHO, S.E.
	Nomor Telepon	587302
	Jumlah Kantor Kas	0

8. Kerja Sama BPR dengan Bank atau Lembaga Lain**Kerja Sama BPR/BPRS dengan Bank atau Lembaga Lain**

1.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	BPR Artha Berkah Cemerlang
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	1. Bank
	Tanggal Kerja Sama	22 Mei 2017
	Jenis Kerja Sama	kredit
	Uraian Kerja Sama	Sindikasi Kredit an Sri Suprihati
2.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	BPRS Margirizky Bahagia
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	1. Bank
	Tanggal Kerja Sama	30 September 2025
	Jenis Kerja Sama	Sindikasi Kredit
	Uraian Kerja Sama	Sindikai kredit an Ahmad Mubarak
3.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	Bank Mandiri
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	1. Bank
	Tanggal Kerja Sama	27 April 2010



	Jenis Kerja Sama	ABA Tab
	Uraian Kerja Sama	Penempatan ABA
4.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	Bank BNI
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	1. Bank
	Tanggal Kerja Sama	14 Januari 2011
	Jenis Kerja Sama	ABA Tab
	Uraian Kerja Sama	Penempatan ABA
5.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	BPD Jawa Tengah
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	1. Bank
	Tanggal Kerja Sama	29 Februari 2020
	Jenis Kerja Sama	ABA Tab
	Uraian Kerja Sama	Penempatan ABA
6.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	Bank Danamon Indonesia
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	1. Bank
	Tanggal Kerja Sama	27 April 2010
	Jenis Kerja Sama	ABA Giro
	Uraian Kerja Sama	Penempatan ABA
7.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	Bank Rakyat Indonesia
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	1. Bank
	Tanggal Kerja Sama	21 Juli 2022
	Jenis Kerja Sama	ABA Giro
	Uraian Kerja Sama	Penempatan ABA
8.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	PT BPR Artha Berkah Cemerlang
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	1. Bank
	Tanggal Kerja Sama	29 Maret 2018



	Jenis Kerja Sama	ABA Tab
	Uraian Kerja Sama	Penempatan ABA
9.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	BPR DP Taspen
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	1. Bank
	Tanggal Kerja Sama	23 Mei 2025
	Jenis Kerja Sama	ABA Deposito
	Uraian Kerja Sama	Penempatan ABA

9. Penanganan Pengaduan Nasabah

Strategi pemasaran yang efektif, engagement kepada nasabah perlu terus dijaga dan ditingkatkan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kepuasan nasabah (customer satisfaction) terhadap layanan yang diberikan, sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan bisnis.

BPR Lumbungartha Muntilanindo terus berupaya menjaga konsistensi layanan yang fokus pada pelanggan melalui standarisasi kualitas layanan di front liner termasuk pada layanan penanganan keluhan pelanggan (complaint handling) yang siap memberikan pelayanan bisnis maupun support bisnis bagi unit kerja hingga penyelesaian keluhan nasabah sesuai dengan ketentuan OJK yang diatur dalam POJK No. 22 Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Pengaduan nasabah akan diproses sebagaimana alur berikut:

-



Pada penyampaian hasil penyelesaian, nasabah dapat menyepakati ataupun tidak menyepakati hasil penyelesaian pengaduan sehingga di SOP Pelindungan Konsumen BPR Lumbungartha Muntilanindo diatur bahwa:

1. Jika sepakat, maka pengaduan dianggap selesai.
2. Apabila tidak sepakat, nasabah dapat mengajukan penyelesaian pengaduan melalui tahapan banding ke BPR Lumbungartha Muntilanindo.
3. Apabila nasabah tetap tidak dapat menerima hasil penyelesaian pengaduan setelah tahap banding, nasabah dapat mengajukan permohonan penyelesaian pengaduan di pengadilan atau luar pengadilan. Penyelesaian pengaduan di luar pengadilan dapat dilakukan melalui mediasi maupun arbitrase kepada Regulator, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), atau lembaga lainnya.

Dalam penanganan pengaduan nasabah, BPR Lumbungartha Muntilanindo telah memiliki prosedur yang telah ditetapkan untuk memberikan solusi yang cepat, tepat, dan memuaskan bagi nasabah. Pada tahun 2025, terdapat pengaduan nasabah sebagai berikut:



1. Toyib, tanggal 19 Agustus 2025 □ permohonan keringanan pembayaran pokok
 2. Sarjono, tanggal 21 Oktober 2025 □ pengaduan tentang pengajuan penyelesaian kredit dengan cara hanya pembayaran pokok dan akan pelunasan menunggu aset terjual.
 3. Sarjono, tanggal 30 Oktober 2025 □ pengaduan tentang pengajuan penyelesaian kredit dengan cara hanya pembayaran pokok dan akan pelunasan menunggu aset terjual.
- semua pengaduan yang masuk pada laman layanan pengaduan konsumen sudah diberikan tanggapan sesuai dengan batas waktu pengaduan.

10. Tingkat Kesehatan Bank

BPR Lumbungartha Muntilanindo secara rutin melakukan penilaian terhadap risiko dan kinerja Bank melalui pelaksanaan self- assessment Tingkat Kesehatan Bank (TKS) dengan menggunakan pendekatan risiko (Risk-Based Bank Rating) dan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.03/2022 tanggal 04 Maret 2025 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS.

Hasil akhir self-assessment TKS metode RGEC berupa Peringkat Komposit (PK), dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor berikut:

1. Profil Risiko (Risk Profile)
2. Good Corporate Governance (GCG)
3. Rentabilitas (Earnings)
4. Permodalan (Capital)

Tabel Tingkat Kesehatan BPR Lumbungartha Muntilanindo (Self Assessment)

Faktor Penilaian	Penilaian per Semester II 2025	Penilaian Per Semester II 2024
	Peringkat	Peringkat
Profil Risiko (Risk Profile)	2	3
Tata Kelola (Good Corporate Governance)	2	2
Rentabilitas (Earnings)	4	4
Permodalan (Capital)	3	3
Peringkat TKS Berbasis Risiko	2	3

Peringkat Tingkat Kesehatan BPR Lumbungartha Muntilanindo dengan metode penilaian berbasis risiko (RBBR - Risk Based Bank Rating) berada pada Peringkat Komposit 2 (PK 2) – SEHAT dengan rincian untuk masing-masing faktor penilaian yaitu Profil Risiko berada pada Peringkat 2 (Rendah), GCG berada pada Peringkat 2 (Baik), Rentabilitas berada pada Peringkat 4 (Kurang Baik) dan Permodalan berada pada Peringkat 3 (Cukup Baik).



VI. Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Komposisi Sumber Daya Manusia

Statistik Komposisi Karyawan Per Kantor

Jumlah Pegawai Pemasaran	9 orang
Jumlah Pegawai Pelayanan	2 orang
Jumlah Pegawai Lainnya	14 orang
Jumlah Pegawai Tetap	13 orang
Jumlah Pegawai Tidak Tetap	12 orang
Jumlah Pegawai Pendidikan S3	0 orang
Jumlah Pegawai Pendidikan S2	1 orang
Jumlah Pegawai Pendidikan S1/D4	15 orang
Jumlah Pegawai Pendidikan D3	3 orang
Jumlah Pegawai Pendidikan SMA	6 orang
Jumlah Pegawai Pendidikan Lainnya	0 orang
Jumlah Pegawai Laki-laki	12 orang
Jumlah Pegawai Perempuan	13 orang
Jumlah Pegawai Usia <=25	1 orang
Jumlah Pegawai Usia >25-35	13 orang
Jumlah Pegawai Usia >35-45	8 orang
Jumlah Pegawai Usia >45-55	3 orang
Jumlah Pegawai Usia >55	0 orang



2. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia di BPR/BPRS

1.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Tatap Muka Aplikasi Digital SIP-TAKOL (Sistem Informasi Penerapan Tata Kelola)
	Tanggal Pelaksanaan	13 Januari 2025
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Pembicara dari Fernando A. Siahaan, S.E., M.M dan Tim
2.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan & Pemahaman Pelaporan BPR/S
	Tanggal Pelaksanaan	18 Januari 2025
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Pembicara dari Yonatan Prakosa H. S. Akt
3.	Nama Kegiatan Pengembangan	Workshop Pelaporan Rencana & Realisasi Kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan melalui SIPEFULI
	Tanggal Pelaksanaan	30 Januari 2025
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Pembicara dari Otoritas Jasa Keuangan
4.	Nama Kegiatan Pengembangan	Sosialisasi SAK EP dan SEOJK Pedoman Akuntansi BPR
	Tanggal Pelaksanaan	04 Februari 2025
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai



	Uraian Kegiatan	Pembicara dari Otoritas Jasa Keuangan
5.	Nama Kegiatan Pengembangan	Sosialisasi Kewajiban Penyampaian Laporan Penilaian Sendiri dan Pengkinian Data Pokok Bank
	Tanggal Pelaksanaan	04 Februari 2025
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Pembicara dari Otoritas Jasa Keuangan
6.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan/In House Training Cara Mendapatkan dan Mengelola Nasabah
	Tanggal Pelaksanaan	22 Februari 2025
	Jumlah Peserta	4 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Pembicara dari Bp. Dharmawan Sumiran
7.	Nama Kegiatan Pengembangan	Sosialisasi Sistem Informasi Pelaku di Sektor Jasa Keuangan (SIPELAKU)
	Tanggal Pelaksanaan	24 Februari 2025
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Pembicara dari Otoritas Jasa Keuangan
8.	Nama Kegiatan Pengembangan	Transformasi Digital untuk BPR
	Tanggal Pelaksanaan	12 Maret 2025
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Sosialisasi tentang Transformasi Digital untuk BPR



	Nama Kegiatan Pengembangan	Modul Pelatihan Induksi Karyawan Baru BPR
	Tanggal Pelaksanaan	13 Maret 2025
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	sosialisasi tentang Modul Pelatihan Induksi Karyawan Baru BPR
10.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Aplikasi Digital SIPETA utk Menyusun & Menyampaikan Laporan Tahunan BPR-BPRS ke OJK serta Aplikasi Digital SIP-WEB
	Tanggal Pelaksanaan	21 Maret 2025
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Pembicara dari Fernando A. Siahaan, S.E., M.M dan Tim
11.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Aplikasi Digital SILANJUT (Sistem Informasi Laporan Keberlanjutan)
	Tanggal Pelaksanaan	16 April 2025
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Pembicara dari Fernando A. Siahaan, S.E., M.M dan Tim
12.	Nama Kegiatan Pengembangan	PTM Sertifikasi Kompetensi Kerja PE Bisnis & Operasional BPR
	Tanggal Pelaksanaan	21 April 2025
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	sertifikasi untuk PE Kabag Operasional



13.	Nama Kegiatan Pengembangan	Sosialisasi SiPEDULI
	Tanggal Pelaksanaan	19 Juni 2025
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Sosialisasi dari Perbarindo
14.	Nama Kegiatan Pengembangan	Undangan Sosialisasi Implementasi Aplikasi SIPESAT versi 3.0
	Tanggal Pelaksanaan	24 Juni 2025
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Sosialisasi dari OJK
15.	Nama Kegiatan Pengembangan	Webinar Anti Fraud BPR BPRS
	Tanggal Pelaksanaan	24 Juni 2025
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Sosialisasi dari OJK
16.	Nama Kegiatan Pengembangan	Talkshow Forum GRC "Penguatan Kinerja Sektor Jasa Keuangan melalui Implementasi GRC"
	Tanggal Pelaksanaan	07 Juli 2025
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Sosialisasi dari OJK
17.	Nama Kegiatan Pengembangan	Focus Group Discussion Evaluasi dan Peningkatan Kualitas Pelaporan BPR di Jawa Tengah melalui goAML
	Tanggal Pelaksanaan	16 Juli 2025



	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Sosialisasi dari PPAK
18.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelaksanaan Kegiatan Hari Indonesia Menabung (HIM) dan Puncak Bulan Literasi Keuangan 2025
	Tanggal Pelaksanaan	17 Juli 2025
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Sosialisasi dari OJK
19.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Tatap Muka Aplikasi Digital SIPPATUH (Sistem Informasi Penerapan Kepatuhan)
	Tanggal Pelaksanaan	24 Juli 2025
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Pembicara dari Fernando A. Siahaan, S.E., M.M dan Tim
20.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Tatap Muka Aplikasi Digital SIPPENA Versi 2 (Sistem Informasi Pelaporan dan Pengaduan Nasabah)
	Tanggal Pelaksanaan	21 Agustus 2025
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Pembicara dari Fernando A. Siahaan, S.E., M.M dan Tim
21.	Nama Kegiatan Pengembangan	Workshop Hukum dan Kepatuhan : DEBITUR DIPENJARA ATAU DITAHAN? Pahami Batas



		Kewenangan Keperdataannya dan Aneka Status 'Kematian Perdata' yang relevan dalam Bidang Perkreditan
	Tanggal Pelaksanaan	27 Agustus 2025
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Pembicara dari Adv. Libertus S. Pane, S.H., M.Kn. C.P.A
22.	Nama Kegiatan Pengembangan	Sosialisasi Bulan Inklusi Keuangan 2025
	Tanggal Pelaksanaan	03 September 2025
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	OJK
23.	Nama Kegiatan Pengembangan	Bimtek Membangun Hubungan Industrial Harmonis melalui Substansi PP & PKB yg Adil dan sesuai peraturan Perundang-Undangan
	Tanggal Pelaksanaan	10 September 2025
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Pembicara dari Disnakertrans Prov. Jateng & Disperinnaker Kab. Magelang
24.	Nama Kegiatan Pengembangan	Workshop Hukum Praktis "Satu Akta Multi Pinjaman"
	Tanggal Pelaksanaan	11 September 2025
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Pembicara Adv. Libertus S. Pane, S.H., m.Kn, C.P.A.



25.	Nama Kegiatan Pengembangan	Sosialisasi POJK No. 8 Tahun 2023 ttg Penerapan Program APU-PPT & PPSPM di Sektor Jasa keuangan kpd IJK dibawah Pengawasan KOSG & KOTG
	Tanggal Pelaksanaan	11 September 2025
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Sosialisasi dari OJK
26.	Nama Kegiatan Pengembangan	Tren Modus dan Skema Pencucian Uang Terbaru: Strategi Identifikasi, Mitigasi, dan Penegakan Hukum
	Tanggal Pelaksanaan	18 September 2025
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Sosialisasi dari OJK
27.	Nama Kegiatan Pengembangan	Sosialisasi Tata Cara Pembayaran Premi Penajminan Simpanan dan Premi Program restrukturisasi Perbankan dengan Metode Pembayaran Nominal Tertutup
	Tanggal Pelaksanaan	07 Oktober 2025
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Sosialisasi dari LPS
28.	Nama Kegiatan Pengembangan	Sosialisasi dan Refreshment Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) Modul Penerapan Strategi Anti Fraud terintegrasi (SAFT)
	Tanggal Pelaksanaan	09 Oktober 2025
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR



	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Sosialisasi dari OJK
29.	Nama Kegiatan Pengembangan	Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan dan Penguatan Model Bisnis dan Awareness Teknologi Informasi (TI) bagi BPR
	Tanggal Pelaksanaan	15 Oktober 2025
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Sosialisasi dari OJK
30.	Nama Kegiatan Pengembangan	Workshop "Menentukan Domisili Hukum Dalam Perjanjian Kredit, Surat-surat Bernilai Pembuktian Penting, Gugatan, Laporan Pidana, Serta Implikasi Hukum dan Bisnis Akibat Kesalahan Penerapan"
	Tanggal Pelaksanaan	16 Oktober 2025
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Pembicara Budhi Risianto Y.A., S.H & Adv. Libertus S. Pane, S.H., m.Kn, C.P.A.
31.	Nama Kegiatan Pengembangan	Peran Digital Forensik dalam Penanganan dan Pengungkapan Kejahatan Keuangan
	Tanggal Pelaksanaan	16 Oktober 2025
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Sosialisasi dari OJK
32.	Nama Kegiatan Pengembangan	Sosialisasi Enhancement Pelaporan SLIK Tahun 2025
	Tanggal Pelaksanaan	17 Oktober 2025
	Jumlah Peserta	1 orang



	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Sosialisasi dari OJK
33.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Audit Internal BPR ABC Group
	Tanggal Pelaksanaan	23 Oktober 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Pembicara dari RD Anto Widiyatmoko
34.	Nama Kegiatan Pengembangan	Penguatan Implementasi GRC Sektor Jasa Keuangan, Peran Profesi Penunjang
	Tanggal Pelaksanaan	29 Oktober 2025
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Sosialisasi dari OJK
35.	Nama Kegiatan Pengembangan	Workshop Pelaporan Rencana Kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan melalui Sistem Informasi Pelaporan Edukasi dan Pelindungan Konsumen (SiPEDULI) kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK)
	Tanggal Pelaksanaan	30 Oktober 2025
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Sosialisasi dari OJK
36.	Nama Kegiatan Pengembangan	Talkshow "Bikin Lapbul Lebih Mudah, Cepat dan sesuai Regulasi"
	Tanggal Pelaksanaan	30 Oktober 2025
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR



	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Sosialisasi dari ruangkonsultan.id
37.	Nama Kegiatan Pengembangan	Workshop "Pengikatan Kredit & jaminan untuk Janda/Duda Status hukum Personal, Status Harta, Kedudukan Anak & teknis Menyusun Komparisi dalam PK & SKMHT/ APHT"
	Tanggal Pelaksanaan	21 November 2025
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Pembicara dari Adv. Libertus S. Pane, S.H., M.Kn. C.P.A
38.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan APU PPT, PPPSPM, SAF & Perlindungan Konsumen
	Tanggal Pelaksanaan	22 November 2025
	Jumlah Peserta	24 orang
	Pihak Pelaksana	01. Internal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Pembicara dari Yonatan Prakosa Haryanto, S.Akt
39.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Aplikasi Digital SI-RAKB V3
	Tanggal Pelaksanaan	01 Desember 2025
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Pembicara dari Fernando A. Siahaan, S.E., M.M dan Tim
40.	Nama Kegiatan Pengembangan	Sosialisasi SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2025 tentang Rencana Bisnis BPR & SEJOK Nomor 27/SEOJK.03/2025 tentang Lembaga Pemeringkat & Peringkat yg Diakui OJK
	Tanggal Pelaksanaan	05 Desember 2025



	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	OJK
41.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan "Pengamanan Kejahatan Cyber Bagi Direksi BPR" Harmonisasi Direksi
	Tanggal Pelaksanaan	12 Desember 2025
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	02. Direksi dan/atau Dewan Komisaris
	Uraian Kegiatan	Sosialisasi dari Perbarindo
42.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Aplikasi Digital SIAP-TKS BPR/BPRS untuk Menyusun dan Menyampaikan Laporan Tingkat Kesehatan BPR/BPRS Semester II Tahun 2025 ke OJK Satu Klik ke APOLO
	Tanggal Pelaksanaan	19 Desember 2025
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Pembicara dari Fernando A. Siahaan, S.E., M.M dan Tim
43.	Nama Kegiatan Pengembangan	Sosialisasi Ketentuan POJK dan PADK tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
	Tanggal Pelaksanaan	30 Desember 2025
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Sosialisasi dari OJK



VII. Laporan Keuangan Tahunan

1. Laporan Posisi Keuangan

Laporan Posisi Keuangan

Dalam Ribuan Rupiah

Keterangan	Posisi 2025	Posisi 2024
Kas dalam Rupiah	102.045	104.652
Kas dalam Valuta Asing	0	0
Surat Berharga	0	0
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Surat Berharga	0	0
Penempatan pada Bank Lain	4.756.310	6.780.072
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Penempatan pada Bank Lain	0	0
Kredit yang Diberikan (Baki Debet)	24.864.653	20.679.187
Provisi yang belum diamortisasi	131.851	112.090
Biaya Transaksi Belum diamortisasi	0	0
Pendapatan Bunga yang Ditangguhkan dalam rangka restrukturisasi	5.795	5.795
Cadangan Kerugian Restrukturisasi	54.685	0
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Kredit yang Diberikan	1.075.770	1.229.804
Penyertaan Modal	0	0
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Penyertaan Modal	0	0
Agunan yang diambil alih	700.000	700.000
Properti Terbengkalai	0	0
Aset Tetap dan Inventaris	682.870	740.060
Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai Aset Tetap dan Inventaris	651.201	711.365
Aset Tidak Berwujud	117.500	117.500
Akumulasi Amortisasi dan Penurunan Nilai Aset Tidak Berwujud	117.500	117.500
Aset Antarkantor	0	0
Aset Keuangan Lainnya	0	0
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan Lainnya	0	0
Aset Lainnya	617.975	512.497



PT. BPR LUMBUNGARTHA MUNTILANINDO

JALAN PEMUDA NO 16 MUNTILAN

Telepon: 0293 587302

Website: lumbungartha.co.id, Email: lumbung.artha@yahoo.com

TOTAL ASET	29.804.550	27.457.413
Liabilitas Segera	127.120	220.390
Tabungan	4.495.801	5.028.054
Biaya Transaksi Tabungan Belum Diamortisasi	0	0
Deposito	17.039.220	13.832.952
Biaya Transaksi Deposito Belum Diamortisasi	0	0
Simpanan dari Bank Lain	0	0
Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	0	0
Pinjaman yang Diterima	0	0
Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	0	0
Diskonto Belum Diamortisasi	0	0
Dana Setoran Modal-Kewajiban	0	0
Liabilitas Antarkantor	0	0
Liabilitas Lainnya	281.830	313.004
TOTAL LIABILITAS	21.943.970	19.394.400
Modal Dasar	10.000.000	10.000.000
Modal yang Belum Disetor -/-	2.600.000	2.600.000
Tambahan Modal Disetor	0	0
Agio	0	0
Modal Sumbangan	0	0
Dana Setoran Modal - Ekuitas	0	0
Tambahan Modal Disetor Lainnya	0	0
Keuntungan (Kerugian) dari Perubahan Nilai Aset Keuangan dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	0	0
Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	0	0
Ekuitas Lainnya	0	0
Pajak Penghasilan terkait dengan Ekuitas Lain	0	0
Cadangan	0	0
Umum	708.477	708.477
Tujuan	500.000	500.000
Laba (Rugi)	0	0
Laba (Rugi) Tahun-Tahun Lalu	-545.464	812.694
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	-202.433	-1.358.159
TOTAL EKUITAS	7.860.580	8.063.013



2. Laporan Laba Rugi

Laporan Laba Rugi

Dalam Ribuan Rupiah

Keterangan	Posisi 2025	Posisi 2024
Pendapatan Operasional	5.581.234	3.622.875
1. Pendapatan Bunga		
a. Bunga Kontraktual		
Surat Berharga	0	0
Giro	13.010	34.418
Tabungan	14.538	26.201
Deposito	142.218	256.813
Sertifikat Deposito	0	0
KYD Kepada Bank Lain	0	0
KYD Kepada Pihak Ketiga bukan Bank	3.036.967	2.479.380
b. Provisi Kredit		
Kredit Kepada Bank Lain	0	0
Kredit Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	88.949	53.247
c. Biaya Transaksi -/-		
Surat Berharga	0	0
KYD Kepada Bank Lain	0	0
KYD Kepada Pihak Ketiga bukan Bank	0	0
d. Koreksi Atas Pendapatan Bunga -/-		
2. Pendapatan Lainnya		
a. Pendapatan Jasa Transaksi	0	0
b. Keuntungan Penjualan Valuta Asing	0	0
c. Keuntungan Penjualan Surat Berharga	0	0
d. Penerimaan Kredit yang Dihapusbuku	176.885	314.220
e. Pemulihan CKPN	1.687.716	29.308
f. Dividen	0	0
g. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0	0
h. Keuntungan penjualan AYDA	0	0
i. Pendapatan Ganti Rugi Asuransi	0	0
j. Pemulihan penurunan nilai AYDA	0	0



k. Lainnya	420.952	429.288
Beban Operasional	5.788.139	4.961.524
1. Beban Bunga		
a. Beban Bunga Kontraktual		
Tabungan	94.276	96.291
Deposito	822.679	836.080
Simpanan dari Bank Lain	0	0
Pinjaman yang Diterima Dari Bank Indonesia	0	0
Pinjaman yang Diterima Dari Bank Lain	0	0
Pinjaman yang Diterima Dari Pihak Ketiga Bukan Bank	0	0
Pinjaman yang Diterima Berupa Pinjaman Subordinasi	0	0
Beban Bunga Lainnya	36.661	37.669
b. Biaya Transaksi		
Kepada Bank Lain	0	0
Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	0	0
2. Beban Kerugian Restrukturisasi Kredit	54.685	0
3. Beban Kerugian Penurunan Nilai		
a. Surat Berharga	0	0
b. Penempatan pada Bank Lain	0	0
c. KYD Kepada Bank Lain	0	0
d. KYD Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	1.533.682	900.135
e. Penyertaan Modal	0	0
f. Aset Keuangan Lainnya	0	0
4. Beban Pemasaran	8.762	17.156
5. Beban Penelitian dan Pengembangan	0	0
6. Beban Administrasi dan Umum		
a. Beban Tenaga Kerja		
Gaji dan Upah	1.812.843	1.590.697
Honorarium	274.500	267.201
Lainnya	253.332	238.912
b. Beban Pendidikan dan Pelatihan	31.912	66.240
c. Beban Sewa		
Gedung Kantor	258.583	220.375
Lainnya	222.119	193.408



d. Beban Penyusutan/Penghapusan atas Aset Tetap dan Inventaris	17.761	21.591
e. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0	5.417
f. Beban Premi Asuransi	0	0
g. Beban Pemeliharaan dan Perbaikan	81.426	106.059
h. Beban Barang dan Jasa	189.154	188.431
i. Beban Penyelenggaraan Teknologi Informasi	0	0
j. Kerugian terkait risiko operasional		
Kecurangan internal	0	0
Kejahatan eksternal	0	0
k. Pajak-pajak	7.666	56.119
7. Beban lainnya		
a. Kerugian Penjualan Valuta Asing	0	0
b. Kerugian Penjualan Surat Berharga	0	0
c. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0	0
d. Kerugian penjualan AYDA	0	0
e. Kerugian penurunan nilai AYDA	0	0
f. Lainnya	88.096	119.744
Laba (Rugi) Operasional	-206.905	-1.338.649
Pendapatan Non Operasional	29.700	250
1. Keuntungan Penjualan Aset Tetap dan Inventaris	29.700	0
2. Pemulihan Penurunan Nilai Aset Tetap dan Inventaris	0	0
3. Pemulihan Penurunan Nilai Lainnya	0	0
4. Bunga Antar Kantor	0	0
5. Selisih Kurs	0	0
6. Lainnya	0	250
Beban Non Operasional	25.228	19.760
1. Kerugian Penjualan/Kehilangan Aset Tetap dan Inventaris	0	0
2. Kerugian Penurunan Nilai Aset Tetap dan Inventaris	0	0
3. Kerugian Penurunan Nilai Lainnya	0	0
4. Bunga Antar Kantor	0	0
5. Selisih Kurs	0	0
6. Lainnya	25.228	19.760
Laba (Rugi) Non Operasional	4.472	-19.510



Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak	-202.433	-1.358.159
Taksiran Pajak Penghasilan	0	0
Pendapatan Pajak Tangguhan	0	0
Beban Pajak Tangguhan	0	0
Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan	-202.433	-1.358.159
Penghasilan Komprehensif Lain		
1. Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi		
a. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	0	0
b. Lainnya	0	0
c. Pajak Penghasilan terkait	0	0
2. Akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi		
a. Keuntungan (Kerugian) dan Perubahan Nilai Aset Keuangan Dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	0	0
b. Lainnya	0	0
c. Pajak Penghasilan terkait	0	0
Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak	0	0
Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	-202.433	-1.358.159

3. Laporan Komitmen dan Kontijensi

Laporan Rekening Administratif

Dalam Ribuan Rupiah

Keterangan	Posisi 2025	Posisi 2024
Tagihan Komitmen		
Fasilitas Pinjaman yang Diterima yang Belum Ditarik	0	0
Tagihan Komitmen Lainnya	0	0
Kewajiban Komitmen		
Fasilitas Kredit kepada Nasabah yang Belum Ditarik	0	0
Penerusan Kredit (Channeling)	0	0
Kewajiban Komitmen Lainnya	0	0
Tagihan Kontinjensi		
a. Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian		
1) Bunga Kredit yang Diberikan	2.405.176	2.142.211
2) Bunga Penempatan pada Bank Lain	0	0
3) Surat Berharga	0	0
4) Lainnya	0	0

**b. Aset Produktif yang dihapusbuku**

1) Kredit yang Diberikan	2.527.751	2.608.975
2) Penempatan pada Bank Lain	0	0
3) Pendapatan Bunga Atas Kredit yang dihapusbuku	1.720.692	1.882.703
4) Pendapatan Bunga Atas Penempatan Dana pada Bank Lain yang dihapusbuku	0	0
c. Agunan dalam Proses Penyelesaian Kredit	0	0
d. Tagihan Kontinjensi Lainnya	1.089.239	847.234
Kewajiban Kontinjensi	0	0
Rekening Administratif Lainnya	0	0

4. Laporan Perubahan Ekuitas**Laporan Perubahan Ekuitas***Dalam Jutaan Rupiah*

Keterangan	Modal Disetor	Cadangan Tujuan	Cadangan Umum	Saldo Laba Belum Ditetapkan Penggunaannya	Jumlah
Saldo per 31 Des Tahun 2023	7.400	500	708	813	9.421
Dividen	0	0	0	0	0
Pembentukan Cadangan	0	0	0	0	0
DSM Ekuitas	0	0	0	0	0
Laba/Rugi yang Belum Direalisasi	0	0	0	0	0
Revaluasi Aset 2025etap	0	0	0	0	0
Laba/Rugi Periode Berjalan	0	0	0	-1.358	-1.358
Pos Penambah/Pengurang Lainnya	0	0	0	0	0
Saldo per 31 Des Tahun 2024	7.400	500	708	-545	8.063
Dividen	0	0	0	0	0
Pembentukan Cadangan	0	0	0	0	0
DSM Ekuitas	0	0	0	0	0
Laba/Rugi yang Belum Direalisasi	0	0	0	0	0
Revaluasi Aset 2025etap	0	0	0	0	0
Laba/Rugi Periode Berjalan	0	0	0	-202	-202
Pos Penambah/Pengurang Lainnya	0	0	0	0	0

**Saldo Akhir (per 31 Des)****7.400****500****708****-748****7.861**

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas

Dalam Ribuan Rupiah

Keterangan	Saldo 2025	Saldo 2024
Penerimaan pendapatan bunga	3.206.732	2.796.812
Penerimaan pendapatan provisi dan jasa transaksi	88.949	53.247
Penerimaan beban klaim asuransi	0	0
Penerimaan atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan	0	0
Pendapatan operasional lainnya	2.108.668	458.596
Pembayaran beban bunga	0	0
Beban gaji dan tunjangan	0	0
Beban umum dan administrasi	538.042	557.733
Beban operasional lainnya	3.218.907	1.937.170
Pendapatan non operasional lainnya	29.700	250
Beban non operasional lainnya	25.228	19.760
Pembayaran pajak penghasilan	0	0
Penyesuaian lainnya atas pendapatan dan beban	0	0
Penempatan pada bank lain	-2.023.762	-2.203.211
Kredit yang diberikan	4.111.020	1.528.383
Agunan yang diambil alih	0	0
Aset lain-lain	105.478	-26.563
Penyesuaian lainnya atas aset operasional	214.198	-884.998
Liabilitas segera	-93.271	74.229
Tabungan	-532.253	86.277
Deposito	3.206.268	-396.523
Simpanan dari bank lain	0	0
Pinjaman yang diterima	0	0
Liabilitas imbalan kerja	0	0
Liabilitas lain-lain	-15.895	-5.539
Penyesuaian lainnya atas liabilitas operasional	0	0
Arus Kas neto dari aktivitas operasi	14.188.010	3.995.623
Pembelian/penjualan aset tetap dan inventaris	-57.190	7.060



Pembelian/penjualan aset tidak berwujud	0	0
Pembelian/penjualan Surat Berharga	0	0
Pembelian/penjualan Penyertaan Modal	0	0
Penyesuaian lainnya	0	0
Arus Kas neto dari aktivitas Investasi	-57.190	7.060
Penerimaan/pembayaran pinjaman yang diterima sebagai modal pelengkap	0	0
Penerimaan/pembayaran pinjaman yang diterima sebagai modal inti tambahan	0	0
Pembayaran dividen	0	0
Penyesuaian lainnya	0	0
Arus Kas neto dari aktivitas Pendanaan	0	0
Peningkatan (Penurunan) Arus Kas	14.130.820	4.002.683
Kas dan setara Kas awal periode	0	0
Kas dan setara Kas akhir periode	14.130.820	4.002.683



VIII. Laporan dan Opini Akuntan Publik

Ringkasan Opini Akuntan Publik

Laporan Tahunan kami sampaikan sesuai dengan data hasil pemeriksaan Auditor Independen Akuntan Publik Indarto dan Yudhika nomor. 00030/2.1358/ AU.8/07/0906-2/1/ II/2026 yang diterbitkan tanggal 20 Februari 2026 dengan opini Laporan Keuangan terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan PT. BPR Lumbungartha Muntilanindo per tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan SAK EP di Indonesia. Laporan Akuntan Publik tersedia pada lampiran Laporan Tahunan ini.



**Surat Pernyataan Direksi
Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan
Posisi Tanggal 31 Desember 2025
PT. BPR LUMBUNGARTHA MUNTILANINDO**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Fitri Adi Nugroho, S.E.
Alamat Kantor : Jl Pemuda No 16, Pucungrejo, Muntilan
Alamat Domisili : Lojajar 004/022 No. 11, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, DIY
Nomor Telepon : (0274)4360018
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Budhi Rochmadi
Alamat Kantor : Jl Pemuda No 16, Pucungrejo, Muntilan
Alamat Domisili : Wates Tengah 003/002, Wates, Magelang utara
Nomor Telepon : 0817243998
Jabatan : Direktur YMFK

Menyatakan bahwa:

1. Laporan Keuangan PT. BPR LUMBUNGARTHA MUNTILANINDO telah disusun untuk laporan keuangan posisi tanggal 31 Desember 2025 dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku,
2. Semua informasi dalam laporan keuangan PT. BPR LUMBUNGARTHA MUNTILANINDO posisi tanggal 31 Desember 2025 telah dimuat secara lengkap dan benar,
3. Bertanggung jawab atas penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan PT. BPR LUMBUNGARTHA MUNTILANINDO posisi tanggal 31 Desember 2025 sesuai POJK mengenai integritas pelaporan keuangan Bank,
4. Hasil Penilaian terhadap efektifitas pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan BPR sesuai dengan dokumen Penilaian Sendiri Pengendalian Internal dalam Pelaporan Keuangan Bank (terlampir).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Magelang, 27 April 2026

PT. BPR LUMBUNGARTHA MUNTILANINDO

Fitri Adi Nugroho, S.E.
Direktur Utama



Budhi Rochmadi
Direktur YMFK



PT. BPR

LUMBUNGARTHA

MUNTILANINDO

Alamat Kantor : Jl. Pemuda No.16 Muntian, Telp. (0293) 587302, 587564 Fax. (0293) 587302

**Lembar Pernyataan
Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris
tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan Tahun 2025
PT. BPR LUMBUNGARTHA MUNTILANINDO**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT. BPR LUMBUNGARTHA MUNTILANINDO tahun 2025 telah ditinjau dan dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Magelang, 27 April 2026

PT. BPR LUMBUNGARTHA MUNTILANINDO

Yang menyatakan,


Fitri Adi Nugroho, S.E
Direktur Utama




Budhi Rochmadi
Direktur YMKF


Mia Budy Setyagraha
Komisaris Utama


R. Dionesius Anto Widiyatmoko
Komisaris



PT. BPR
LUMBUNGARTHA
MUNTILANINDO

Kantor Pusat : Jl. Pemuda No.16 Muntilan. Telp. (0293) 587302, 587564 Fax. (0293) 587302

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT LUMBUNGARTHA MUNTILANINDO

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025 Dengan Perbandingan 2024

Dan

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT LUMBUNGARTHA MUNTILANINDO
LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025

DAFTAR ISI

	Halaman
SURAT PERNYATAAN MANAJEMEN	i
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	ii
LAPORAN KEUANGAN	
• Neraca	1
• Laporan Laba Rugi	2
• Laporan Perubahan Ekuitas	3
• Laporan Arus Kas	4
• Laporan Komitmen dan Kontijensi	5
Catatan Atas Laporan Keuangan.....	6
Analisa Laporan Keuangan.....	19

SURAT PERNYATAAN MANAJEMEN



PT. BPR

LUMBUNGARTHA

MUNTILANINDO

Kantor Pusat : Jl. Pemuda No.16 Muntlan. Telp. (0293) 587302, 587584 Fax. (0293) 587302

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
PT. BPR LUMBUNGARTHA MUNTILANINDO**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fitri Adi Nugroho
Jabatan : Direktur Utama
Alamat Kantor : Jalan Pemuda No. 16 RT 003, RW 010, Pucungrejo, Muntlan,
Magelang, Jawa Tengah 56414

Nama : Budhi Rochmadi
Jabatan : Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
Alamat Kantor : Jalan Pemuda No. 16 RT 003, RW 010, Pucungrejo, Muntlan,
Magelang, Jawa Tengah 56414

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT. BPR Lumbungartha Muntlanindo.
2. Laporan keuangan PT. BPR Lumbungartha Muntlanindo telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT. BPR Lumbungartha Muntlanindo telah dimuat secara lengkap dan benar,
b. Laporan keuangan PT. BPR Lumbungartha Muntlanindo tidak mengandung informasi atau fakta material tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan dalam PT. BPR Lumbungartha Muntlanindo.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Muntlan, Februari 2026
PT. BPR LUMBUNGARTHA MUNTILANINDO



Fitri Adi Nugroho
Direktur Utama

Budhi Rochmadi
Direktur Yang Membawahkan Fungsi
Kepatuhan

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN



INDARTO DAN YUDHIKA
Registered Public Accountant
Audit, Tax, Management Consultant
Kep. 1323/KM.1/2021

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No: 00030/2.1358/AU.B/07/0906-2/1/II/2026

Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

PT. BPR Lumbungartha Muntinanindo

Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Kami telah mengaudit Laporan Keuangan PT. BPR Lumbungartha Muntinanindo ("Perusahaan"), yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan tanggal 31 Desember 2025, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, Laporan Keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, Laporan Posisi Keuangan PT. BPR Lumbungartha Muntinanindo terlampir untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Laporan Arus Kas untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Penekanan Atas Suatu Hal

Kami menarik perhatian pada Catatan Atas Laporan Keuangan nomor "2.p.", yang menjelaskan bahwa laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 telah disajikan kembali untuk menyesuaikan saldo-saldo agar sesuai dengan SAK EP. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan



INDARTO DAN YUDHIKA
Registered Public Accountant
Audit, Tax, Management Consultant
Kep. 1323/KM.1/2021

bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

KAP Indarto dan Yudhika
Managing Partner



Indarto Waluyo, M.Acc, Ak, CPA, CA, CPI.
NRAP AP-0906

Yogyakarta, 20 Februari 2026: SM



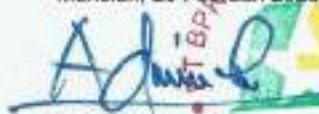
LAPORAN KEUANGAN

PT. BPR LUMBUNGARTHA MUNTILANINDO
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2025 Dan 2024
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Des 2025 (Sesuai SAK EP)	31 Des 2024 (Restatement Sesuai SAK EP)	31 Des 2024 (Sesuai SAK ETAP)
ASET				
Kas	3.	102.044.900	104.651.600	104.651.600
Pendapatan Bunga yang Akan Diterima		-	-	175.791.357
Penempatan Pada Bank Lain	4.	4.756.309.752	6.780.071.699	6.780.071.699
Kredit yang Diberikan	5.	24.672.321.325	20.561.301.476	20.561.301.476
PPAP Kredit Yang Diberikan		-	-	(1.229.804.002)
CKPN Kredit Yang Diberikan	5. & 6.	(1.075.770.284)	(1.229.804.002)	-
Agunan Yang Diambil Alih	7.	700.000.000	700.000.000	700.000.000
Aset Tetap dan Inventaris	8.	682.870.060	740.060.060	740.060.060
Akm Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris	8.	(651.200.584)	(711.364.571)	(711.364.571)
Aset Tidak Berwujud	9.	117.500.000	117.500.000	117.500.000
Akm Amortisasi Aset Tidak Berwujud	9.	(117.499.998)	(117.499.998)	(117.499.998)
Aset Lain-lain	10.	617.974.818	512.496.600	336.705.243
Jumlah Aset		29.804.549.990	27.457.412.865	27.457.412.865
LIABILITAS				
Liabilitas Segera	11.	127.119.544	220.390.286	220.390.286
Utang Bunga	12.	42.822.703	34.551.066	34.551.066
Simpanan				
Tabungan	13.	4.495.800.918	5.028.053.960	5.028.053.960
Deposito Berjangka	13.	17.039.220.375	13.832.951.985	13.832.951.985
Liabilitas Imbalan Kerja	14.	193.352.386	208.631.993	208.631.993
Liabilitas Lainnya	15.	45.654.428	69.820.728	69.820.728
Jumlah Kewajiban		21.943.970.354	19.394.400.019	19.394.400.019
EKUITAS				
Modal Saham	16.	7.400.000.000	7.400.000.000	7.400.000.000
Cedangan Umum	17.	708.477.222	708.477.222	708.477.222
Cedangan Tujuan	17.	500.000.000	500.000.000	500.000.000
Labai/Rugi Ditahan	17.	(545.464.374)	812.694.427	812.694.427
Saldo Labai/Rugi	17.	(202.433.212)	(1.358.158.802)	(1.358.158.802)
Jumlah Ekuitas		7.860.579.635	8.063.012.846	8.063.012.846
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		29.804.549.990	27.457.412.865	27.457.412.865

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan.

Muntilan, 20 Februari 2026


Fitri Adi Nugroho
Direktur Utama


Budhi Rochmadi
Direktur Yang Membawahkan
Fungsi Kepatuhan

PT. BPR LUMBUNGARTHA MUNTILANINDO
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2025
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Des 2025 (Sesuai SAK EP)	31 Des 2024 (Restatement Sesuai SAK EP)	31 Des 2024 (Sesuai SAK ETAP)
Pendapatan Operasional				
Pendapatan Bunga	18.	3.295.681.110	2.850.059.063	2.850.059.063
Pendapatan Lainnya	19.	2.285.552.661	772.815.942	772.815.942
Jumlah Pendapatan Operasional		5.581.233.771	3.622.875.005	3.622.875.005
Beban Operasional				
Beban Bunga	20.	953.616.080	970.040.024	970.040.024
Beban Kerugian Restrukturisasi Kredit	21.	54.684.857	-	-
Beban Penyisihan Kerugian	22.	1.533.682.274	900.135.157	900.135.157
Beban Pemasaran	23.	8.762.260	17.155.500	17.155.500
Beban Administrasi dan Umum	24.	3.149.297.488	2.954.449.211	2.954.449.211
Beban Operasional Lainnya	25.	88.095.805	119.743.881	119.743.881
Jumlah Beban Operasional		5.788.138.744	4.961.523.773	4.961.523.773
Laba (Rugi) Operasional		(206.904.972)	(1.338.648.768)	(1.338.648.768)
Pendapatan dan (Beban) Non-Operasional				
Pendapatan Non-operasional	26.	29.700.000	250.000	250.000
Beban Non-operasional	26.	(25.228.240)	(19.760.034)	(19.760.034)
Jumlah Pendapatan (Beban) Non-Operasional		4.471.760	(19.510.034)	(19.510.034)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan		(202.433.212)	(1.358.158.802)	(1.358.158.802)
Taksiran Pajak Penghasilan	27.	-	-	-
Laba (Rugi) Tahun Berjalan		(202.433.212)	(1.358.158.802)	(1.358.158.802)
Penghasilan Komprehensif Lain		-	-	-

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan.

Muntilan, 20 Februari 2026




Fitri Adi Nugroho **Buihi Rochmadi**
 Direktur Utama Direktur Yang Membawahkan
 Fungsi Kepatuhan

PT. BPR LUMBUNGARTHA MUNTILANINDO
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pos	Modal Disetor	Cadangan Tujuan	Cadangan Umum	Saldo Laba Belum Ditentukan Penggunaannya	Jumlah
Saldo per 31 Desember 2023	7.400.000.000	500.000.000	708.477.222	812.627.657	9.421.104.878
Penambahan Modal	-	-	-	-	-
Laba/Rugi Periode Berjalan	-	-	-	(1.358.158.802)	(1.358.158.802)
Pos Penambah/Pengurang Lainnya	-	-	-	66.769	66.769
Saldo per 31 Desember 2024	7.400.000.000	500.000.000	708.477.222	(545.464.376)	8.063.012.846
Penambahan Modal	-	-	-	-	-
Laba/Rugi Periode Berjalan	-	-	-	(202.433.212)	(202.433.212)
Pos Penambah/Pengurang Lainnya	-	-	-	-	-
Saldo per 31 Desember 2025	7.400.000.000	500.000.000	708.477.222	(747.897.588)	7.860.579.635

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PT. BPR LUMBUNGARTHA MUNTILANINDO

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
Penerimaan pendapatan bunga	3.206.732.395	2.796.811.951
Penerimaan pendapatan provisi, komisi dan premi	88.948.715	53.247.112
Pendapatan operasional lainnya	2.285.552.661	772.815.942
Pembayaran beban bunga	(953.616.060)	(970.040.024)
Beban pemasaran	(8.762.260)	(17.155.500)
Beban umum dan administrasi	(3.209.461.473)	(2.927.508.220)
Beban operasional lainnya	(88.095.805)	(119.743.881)
Penyesuaian lainnya atas pendapatan dan beban	(1.742.400.849)	(29.307.858)
Pendapatan non operasional	29.700.000	250.000
Beban non operasional	(25.228.240)	(19.760.034)
Pembayaran pajak penghasilan badan	-	-
Penurunan/(kenaikan) atas aset operasional:		
Penempatan pada bank lain	2.023.761.947	2.203.211.437
Kredit yang diberikan	(4.111.019.849)	(1.528.382.887)
Aset yang diambil alih	-	-
Aset lain-lain	(105.478.218)	26.562.507
Penyesuaian lainnya atas aset operasional		
Kenaikan/(penurunan) atas liabilitas operasional:		
Liabilitas segera	(93.270.742)	67.994.377
Tabungan	(532.253.042)	86.277.010
Deposito	3.206.268.390	(396.522.985)
Liabilitas imbalan kerja	(15.279.607)	33.319.013
Liabilitas lain-lain	(15.894.663)	695.971
Kas netto yang diperoleh dari aktivitas operasional	(59.796.700)	32.763.931
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pembelian/penjualan aset tetap dan inventaris	57.190.000	(7.060.000)
Kas netto yang diperoleh dari aktivitas investasi	57.190.000	(7.060.000)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Koreksi Laba Ditahan	-	66.769
Kas netto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	-	66.769
KENAIKAN/(PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	(2.606.700)	25.770.700
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	104.651.600	78.880.900
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	102.044.900	104.651.600

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PT. BPR LUMBUNGARTHA MUNTILANINDO
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTIJENSI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

	2025	2024
	(Rp)	(Rp)
KOMITMEN		
1. Fasilitas pinjaman yang diterima dan belum ditarik	-	-
2. Fasilitas kredit kepada nasabah dan belum ditarik	-	-
3. Lain-lain	-	-
Jumlah Komitmen	-	-
KONTIJENSI		
1. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	2.405.176.148	2.142.211.429
2. Aset produktif yang dihapusbukukan	4.248.443.835	4.491.677.835
3. Lain-lain	1.089.238.871	847.233.744
Jumlah Kontijensi	7.742.858.854	7.481.123.008

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PT. BPR LUMBUNGARTHA MUNTILANINDO

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. GAMBARAN UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT BPR Lumbungartha Muntilanindo (Perseroan) berkedudukan di Jalan Pemuda No 16, RT 003, RW 010, Desa Pucungrejo, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan akta Notaris Djedjem Wijaya, S.H., notaris di Yogyakarta, Perseroan didirikan dengan nama PT BPR Artha Kencana dengan akta No 45 tanggal 18 Agustus 1990, dan anggaran dasarnya diubah berdasarkan akta no 44 tanggal 17 Januari 1991 dan akta no 39 tanggal 23 April 1991. Ketiga akta mengenai anggaran dasar tersebut dibuat dihadapan Djejem Widjaya, S.H., notaris di Yogyakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dengan Kutipan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-1575 HT.01.01.Th 91 tanggal 8 Mei 1991.

Dalam perjalanannya Perseroan berubah nama menjadi PT. Bank Perkreditan Rakyat Lumbungartha Muntilanindo melalui Akta no. 01 tanggal 1 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Irwan Santosa, S.H., notaris di Jakarta, dan mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor AHU-54826.AH.01.02 TAHUN 2008 tanggal 25 Agustus 2008. Berdasarkan Akta No. 195 tanggal 30 Oktober 2023, yang dibuat dihadapan Justicia Eka Puspita, S.H., M.Kn., notaris di Sleman, dan telah mendapatkan pengesahan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0185129 pada tanggal 15 November 2023, Perseroan berganti nama menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntilanindo.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa perubahan, perubahan terakhir melalui akta no. 44 tanggal 18 Juli 2025 dibuat dihadapan Justicia Eka Puspita, S.H., M.Kn., Notaris di Sleman, dan telah mendapatkan pengesahan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0313727 pada tanggal 21 Juli 2025.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan didirikannya PT. BPR Lumbungartha Muntilanindo yang telah dicatatkan dalam akta no. 195 tanggal 30 Oktober 2023 yang dibuat di hadapan Justicia Eka Puspita S.H., M.Kn., adalah berusaha di bidang Aktivitas Keuangan dan Asuransi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- 1) Aktivitas jasa Keuangan, bukan Asuransi dan Dana Pensiun, yaitu Perantara Moneter mencakup Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, antara lain Bank Perkreditan Rakyat mencakup kegiatan usaha bank secara konvensional, meliputi penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito, tabungan dan / atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

c. Perijinan Usaha

- 1) Tanda Daftar Perusahaan Terbatas nomor TDP 11.30.1.64.00.028 yang dikeluarkan oleh kantor pelayanan Terpadu Pemerintah kota Kota Magelang tanggal 25 April 2017.
- 2) Keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep.599/KM.13/91 tentang pemberian izin usaha PT BPR Lumbungartha Muntilanindo tanggal 26 Nopember 1991.
- 3) Ijin usaha bank yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 28 April 1992 No. 25/38/UPBD/PBBPR/Sm.
- 4) Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) 517/399/distarum/2010.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PT. BPR LUMBUNGARTHA MUNTILANINDO

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. GAMBARAN UMUM (LANJUTAN)

c. Perijinan Usaha (Lanjutan)

- 5) Surat ijin gangguan dan ijin Tempat Usaha Nomor: 504/356/HO/34/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tanggal 25 April 2017.
- 6) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 1.454.890.3.524.000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Magelang.
- 7) Ijin Pembukaan Kantor Kas Secang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 11 November 2013, Nomor: 15/523/Sm.
- 8) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha: 1208240064127 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, pada tanggal 12 Agustus 2024 dengan perubahan ke - 1 tanggal 14 Agustus 2024.

d. Susunan Pengurus

Susunan pengurus PT. BPR Lumbung Artha Muntilanindo per 31 Desember 2025 dijelaskan berdasarkan Akta Notaris Pernyataan Keputusan RUPS No. 44 tanggal 18 Juli 2025 oleh Notaris Justicia Eka Puspita, SH., M.Kn; notaris di Sleman, yang telah disahkan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0313727 pada tanggal 21 Juli 2025. Akta tersebut menjelaskan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2025 sebagai berikut:

Komisaris Utama	: Mia Budy Setyagraha
Komisaris	: Raden Dionesius Anto Widiyatmoko
Direktur Utama	: Fitri Adi Nugroho
Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	: Budhi Rochmadi

e. Permodalan

Komposisi Permodalan berdasarkan Akta Notaris Aloysius Yossi Aribowo Notaris di Sleman Yogyakarta, No. 98 tanggal 29 Januari 2020 tentang pernyataan keputusan RUPS LB. Penambahan modal disetor ini telah sesuai surat OJK No. S- 469/KR.0313/2019 tanggal 03-12-2019 dan surat OJK No. S-28/KR.0313/2020 tanggal 22-01-2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 3 Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam akta tersebut menjelaskan tentang penambahan modal disetor dari Dana setoran modal - ekuitas dan Dana setoran modal - kewajiban yaitu sebesar Rp2.400.000.000,-. (dua milyar empat ratus juta rupiah). Sehingga jumlah Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) terdiri dari 100.000 (seratus ribu) saham, masing - masing saham bernilai nominal Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Dari modal dasar tersebut ditempatkan dan disetor sejumlah 74.000 (tujuh puluh empat ribu) saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp 7.400.000.000,00 (tujuh miliar empat ratus juta rupiah).

Akta notaris kepemilikan modal tersebut diperbaharui dengan akta perubahan Nomor 134 tertanggal 22 Mei 2023 dihadapan notaris Justicia Eka Puspita, SH., M.Kn notaris di Sleman, dan telah diterima dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0119128 tanggal 22 Mei 2023. Susunan pemegang saham tahun 2025 adalah sebagai berikut:

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**PT. BPR LUMBUNGARTHA MUNTILANINDO**

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. GAMBARAN UMUM (LANJUTAN)**e. Permodalan (Lanjutan)**

No	Pemegang Saham	Lembar	Nominal (Rp)	%
1	Ny. Mia Budy Setyagraha	40.700	4.070.000.000	55%
2	Ny. Hj. Raehana Fatimah	16.280	1.628.000.000	22%
3	Tn. Yudhistira	16.280	1.628.000.000	22%
4	Ny. Nuning Setyowati	740	74.000.000	1%
Total		74.000	7.400.000.000	100%

f. Jumlah, Jenis, dan Lokasi Kantor

PT BPR Lumbungartha Muntilanindo sampai dengan 31 Desember 2025 mempunyai satu Kantor Pusat.

Adapun lokasi Kantor Pusat adalah sebagai berikut :

Kantor Pusat : Jalan Pemuda No. 16 Pucungrejo, Muntilan, Magelang, Jawa Tengah

2. IKTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Komponen Laporan Keuangan

Komponen Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan.

b. Bahasa laporan keuangan

Laporan keuangan disusun dalam Bahasa Indonesia.

c. Tanggung jawab atas laporan keuangan

Direksi BPR bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

d. Mata uang pelaporan

- 1) Pelaporan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah. Apabila transaksi BPR menggunakan mata uang selain dari rupiah, maka laporan tersebut harus dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan. Dalam hal kurs mata uang asing tidak tersedia di Bank Indonesia, BPR menggunakan kurs sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
- 2) Keuntungan atau kerugian dalam periode berjalan yang terkait dengan transaksi dalam mata uang asing dinilai dengan menggunakan kurs laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 3) Transaksi dalam mata uang asing harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

e. Prinsip Penyajian Laporan Keuangan

BPR menyusun laporan keuangan menggunakan dasar akuntansi akrual, kecuali untuk informasi arus kas. Dalam dasar akrual, BPR mengakui aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan atau beban ketika definisi dan kriteria pengakuan terpenuhi. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.36).

f. Laporan Posisi Keuangan

1) Aset

Aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh BPR sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan sumber manfaat ekonomik masa depan yang diharapkan diterima BPR. (Hal ini mengacu pada SAK EP lampiran B).

Adapun pos-pos yang merupakan aset keuangan seperti surat berharga, penempatan pada bank lain, kredit, dan penyertaan modal disertai dengan pos pengurang berupa CKPN.

BPR menghitung Penyisihan Penghapusan Kualitas Aset (PPKA) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) mengenai kualitas aset BPR. Apabila nilai PPKA lebih besar dari CKPN yang dibentuk BPR sesuai dengan SAK EP, maka selisih nilai PPKA dengan CKPN menjadi faktor pengurang dalam perhitungan modal inti BPR.

BPR mengakui aset dalam laporan posisi keuangan ketika kemungkinan besar manfaat ekonomik masa depan akan mengalir ke BPR dan nilai aset dapat diukur secara andal. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.37).

a) Kas

Kas adalah mata uang kertas atau logam dalam rupiah yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Dalam pengertian kas termasuk kas besar, kas kecil, kas dalam mesin anjungan tunai mandiri (ATM), dan kas dalam perjalanan. Tidak termasuk dalam pengertian kas adalah emas batangan, uang logam yang diterbitkan untuk memperingati peristiwa nasional (commemorative coins/notes), dan mata uang emas.

2. IKTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

f. Laporan Posisi Keuangan (*Lanjutan*)

b) Kas dalam valuta asing

Kas dalam valuta asing adalah uang kertas asing (*banknotes*) dan *traveller's cheque* yang masih berlaku yang dimiliki BPR dalam kegiatan penukaran sebagai pedagang valuta asing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. SAK EP Bab 30 tentang Penjabaran Valuta Asing. BPR dapat memiliki kas dalam valuta asing hanya dalam rangka melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang valuta asing yang telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Mata uang asing diakui sebesar kurs transaksi (*spot rate*) yang berlaku pada tanggal perolehan/transaksi. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 30.7). Pada setiap tanggal pelaporan BPR menjabarkan kas dalam valas ke rupiah dengan kurs penutup. Kurs penutup yang dirujuk adalah kurs transaksi Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal pelaporan dengan menggunakan kurs tengah yaitu kurs transaksi jual ditambah kurs transaksi beli mata uang asing Bank Indonesia dibagi dua. Kas dalam valuta asing disajikan dalam pos tersendiri pada laporan posisi keuangan sebesar nilai nominal.

c) Surat Berharga

Surat Berharga adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah Pusat Republik Indonesia, dan/atau Pemerintah Daerah.

Surat berharga diukur pada biaya perolehan ditambah/dikurangi biaya transaksi. Contoh biaya transaksi yaitu *brokerage fee*. Pendapatan bunga diukur dengan suku bunga efektif. Pengukuran selanjutnya diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Surat berharga disajikan dalam pos tersendiri pada laporan posisi keuangan sebesar biaya perolehan diamortisasi.

d) Penempatan Pada Bank lain

Penempatan pada bank lain adalah penempatan/tagihan atau simpanan milik BPR pada bank lain baik konvensional maupun syariah dengan maksud untuk menunjang kelancaran aktivitas operasional, dalam rangka memperoleh penghasilan, dan sebagai *secondary reserve*. Cakupan penempatan pada bank lain adalah penempatan dana BPR pada bank lain dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan penempatan dana lainnya yang sejenis. Nilai tercatat penempatan pada bank lain tidak boleh dikompensasi dengan nilai tercatat liabilitas pada bank lain, meskipun terhadap bank yang sama.

- Giro merupakan simpanan BPR pada bank umum yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM (kartu debit), sarana perintah pembayaran lain atau dengan cara pemindahbukuan.

- Tabungan merupakan simpanan BPR pada bank umum dan BPR lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lain yang dapat dipersamakan dengan itu.

- Deposito merupakan simpanan BPR pada bank umum dan BPR lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara BPR dan bank yang bersangkutan. Deposito terdiri dari deposito yang berjangka waktu dan *deposit on call*. *Deposit on call* merupakan deposito yang berjangka waktu relatif singkat dan dapat ditarik sewaktu-waktu dengan pemberitahuan sebelumnya.

- Sertifikat deposito merupakan simpanan BPR pada bank umum dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan (atas unjuk). Bunga sertifikat deposito dihitung dengan cara diskonto, yaitu selisih antara nominal deposito dengan jumlah uang yang disetor.

- Penempatan pada bank syariah merupakan penempatan dana BPR pada bank umum syariah, unit usaha syariah bank umum dan BPR syariah dengan menggunakan akad syariah. Perlakuan akuntansi merujuk kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah.

2. IKTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

f. Laporan Posisi Keuangan (Lanjutan)

Giro, deposito, dan tabungan pada bank lain pada umumnya dicatat sebesar biaya perolehan, kecuali untuk produk sertifikat deposito dengan diskonto. Pengukuran selanjutnya, diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Nilai tercatat penempatan pada bank lain adalah nilai penempatan pada bank lain neto pada tanggal pelaporan setelah dikurangi CKPN. CKPN penempatan pada bank lain disajikan sebagai pengurang (*offsetting account*) dari penempatan tersebut.

e) Kredit yang Diberikan

Kredit adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara BPR dan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga termasuk pengalihan piutang.

Kredit yang diberikan diukur pada biaya perolehan ditambah/dikurangi biaya transaksi termasuk provisi. Pendapatan bunga diukur dengan suku bunga efektif. Pengukuran selanjutnya diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) adalah penyisihan yang dibentuk atas penurunan nilai instrumen keuangan sesuai standar akuntansi keuangan.

Pada saat penandatanganan perjanjian Kredit dengan debitur, BPR mengakui sebagai "kewajiban komitmen fasilitas Kredit yang diberikan kepada debitur" sebesar Plafon Kredit yang diperjanjikan atau yang dapat ditarik sesuai jadwal penarikan/penggunaan Kredit yang disepakati BPR dengan debitur, kecuali untuk penerusan Kredit. Jumlah kewajiban komitmen fasilitas Kredit tersebut dapat berkurang atau bertambah selama jangka waktu Kredit sesuai jenis kreditnya,

Kredit disajikan dalam pos tersendiri dalam laporan posisi keuangan sebesar biaya perolehan diamortisasi. Kredit sindikasi disajikan berdasarkan porsi Kredit yang risikonya ditanggung BPR, termasuk biaya transaksi yang terkait dengan porsi Kredit dimaksud. Kredit kelolaan disajikan pada pos "Kredit yang Diberikan" berdasarkan porsi Kredit yang risikonya ditanggung BPR termasuk biaya transaksi yang terkait dengan porsi kredit dimaksud.

Pendapatan bunga dari Kredit (yang diperhitungkan dalam estimasi arus kas masa datang pada saat pengakuan awal Kredit atau pada saat penyesuaian suku bunga Kredit) yang telah diakui sebagai pendapatan tetapi belum diterima pembayarannya, disajikan sebagai tagihan bunga Kredit atau pendapatan bunga Kredit yang akan diterima.

Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan BPR dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

Selisih kurang antara perubahan estimasi arus kas atas Restrukturisasi Kredit dibandingkan dengan nilai tercatat diperhitungkan sebagai kerugian kredit.

Kredit restrukturisasi disajikan menjadi bagian dari Kredit.

Penghapusbukuan Kredit (hapus buku) adalah tindakan administratif BPR untuk memindahkan nilai yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan tanpa mengurangi hak tagih BPR kepada debitur secara kontrak. Pada saat kredit dihapus buku, BPR telah membentuk CKPN sebesar 100%.

Penghapusbukuan dilakukan secara keseluruhan terhadap nilai tercatat Kredit dengan menjurnal balik CKPN – Kredit yang diberikan. Kredit yang dihapus buku disajikan dalam Rekening Administratif. Setoran yang diterima dari debitur atas kredit yang telah dihapus buku diakui sebagai Pendapatan Hapus Buku (Pendapatan Operasional Lainnya).

f) Penyertaan Modal

Penyertaan Modal adalah penanaman dana BPR dalam bentuk saham pada lembaga penunjang BPR dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan SAK EP Bab 11 tentang Instrumen Keuangan Dasar dan SAK EP Bab 14 tentang Investasi pada Entitas Asosiasi.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PT BPR LUMBUNGARTHA MUNTILANINDO**

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

f. Laporan Posisi Keuangan (Lanjutan)

BPR mencatat seluruh investasi pada entitas asosiasi menggunakan salah satu metode yaitu metode biaya atau metode ekuitas.

Penghasilan dividen dari investasi pada entitas asosiasi diakui pada saat hak grup untuk menerima pembayaran telah ditetapkan. Penghasilan dividen termasuk dalam penghasilan lain.

BPR mengklasifikasikan investasi pada entitas asosiasi sebagai aset tidak lancar. (Hal ini mengacu SAK EP paragraf 14.11)

g) Agunan Yang Diambil Alih

Agunan yang Diambil Alih selanjutnya disingkat AYDA adalah aset yang diperoleh BPR baik sebagian atau seluruhnya dengan cara pembelian melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban kepada BPR dengan ketentuan agunan yang dibeli untuk dicairkan secepatnya. (sesuai POJK mengenai kualitas aset BPR)

Biaya untuk menjual adalah biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan kepada pelepasan aset atau kelompok lepasan. Nilai Wajar adalah suatu jumlah dimana aset dipertukarkan atau kewajiban diselesaikan, antara pihak yang paham dan berkeinginan dalam suatu transaksi yang wajar. Nilai Tercatat adalah nilai yang disajikan dalam laporan posisi keuangan setelah dikurangi cadangan rugi penurunan nilai.

AYDA yang dicatat dalam laporan posisi keuangan hanya yang berasal dari penyelesaian kredit melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan. BPR memperhitungkan AYDA yang tercatat pada laporan posisi keuangan sebagai faktor pengurang modal inti BPR dalam perhitungan KPMM sesuai dengan POJK mengenai kualitas aset BPR.

Pada saat pengakuan awal, AYDA dibukukan pada nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual yaitu maksimum sebesar kewajiban debitur. BPR tidak boleh mengakui keuntungan pada saat pengambilalihan aset. Setelah pengakuan awal, AYDA dibukukan sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dengan nilai wajarnya setelah dikurangi biaya untuk menjual.

Apabila AYDA mengalami penurunan nilai, maka BPR mengakui rugi penurunan nilai tersebut.

Apabila AYDA mengalami pemulihan penurunan nilai, maka BPR mengakui pemulihan penurunan nilai tersebut maksimum sebesar rugi penurunan nilai yang telah diakui.

AYDA tidak dilakukan depresiasi.

Pada saat penjualan, selisih antara nilai tercatat AYDA dan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian operasional.

Hasil penjualan agunan yang dikuasai diakui sebagai pengurang tagihan yang terkait dengan kredit.

Biaya transaksi dalam proses pengurusan AYDA dapat dikapitalisasi sepanjang nilai AYDA lebih besar dibandingkan nilai tercatat kredit setelah ditambah kapitalisasi biaya transaksi.

AYDA disajikan dalam pos tersendiri dalam laporan posisi keuangan sebesar mana yang lebih rendah, antara: nilai tercatat kredit; atau nilai wajar setelah dikurangi estimasi biaya untuk menjual.

h) Aset Tetap

Aset tetap dan inventaris adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 17.2). Dasar pengaturannya ada pada SAK EP Bab 17 tentang Aset Tetap, SAK EP Bab 20 tentang Sewa dan SAK EP Bab 27 tentang Penurunan Nilai Aset.

2. IKTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

f. Laporan Posisi Keuangan (*Lanjutan*)

Aset tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sesuai PMK No. 72 Tahun 2023.

Penyusutan dimulai ketika suatu aset tetap tersedia untuk digunakan dan penyusutannya dihentikan ketika aset tetap dan inventaris dihentikan pengakuannya.

i) Properti Terbengkalai

Properti Terbengkalai adalah aset tetap dalam bentuk properti yang dimiliki BPR namun tidak digunakan untuk kegiatan usaha BPR yang berkaitan operasional BPR. (sesuai POJK mengenai kualitas aset BPR). Dasar pengaturannya ada pada SAK EP Bab 16 tentang Properti Investasi.

j) Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 18.2).

Bab ini hanya diterapkan untuk akuntansi seluruh aset takberwujud selain goodwill.

Pengakuan awal aset takberwujud diakui sebesar biaya perolehan.

BPR mengukur aset tak berwujud pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Aset tak berwujud diamortisasi secara sistematis selama umur manfaatnya dan diakui sebagai beban setiap periode dengan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sesuai PMK No. 72 Tahun 2023.

Penurunan nilai aset tak berwujud diakui sebagai kerugian periode terjadinya.

k) Aset lainnya

Aset Lainnya adalah pos-pos aset yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam kelompok pos aset yang ada dan tidak secara material untuk disajikan tersendiri.

Komponen aset lainnya, antara lain:

Pajak dibayar dimuka, biaya dibayar dimuka, Mata uang kertas dan logam yang ditarik, Piutang dari perusahaan asuransi, Aset Pajak Tangguhan, Aset Keuangan Lainnya, Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima, Lainnya. Aset lainnya disajikan secara gabungan, kecuali komponennya memiliki nilai yang material, maka komponen tersebut disajikan tersendiri dalam laporan posisi keuangan.

l) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

Penurunan nilai adalah suatu kondisi dimana terdapat bukti objektif terjadinya peristiwa yang merugikan sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal kredit tersebut, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal. Dasar pengaturannya ada pada SAK EP Bab 11 tentang Instrumen Keuangan Dasar.

CKPN adalah penyisihan yang dibentuk apabila nilai tercatat setelah penurunan nilai kurang dari nilai tercatat awal.

Pada setiap akhir periode pelaporan, BPR menilai apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan atau biaya perolehan diamortisasi. Jika terdapat bukti objektif penurunan nilai, BPR langsung mengakui kerugian penurunan nilai dalam laba rugi. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 11.21).

Alur pembentukan CKPN sebagai berikut:

2. IKTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

f. Laporan Posisi Keuangan (*Lanjutan*)

Langkah Pertama: Penilaian Pemenuhan Kriteria Aset Baik

- BPR melakukan penilaian apakah aset keuangan memenuhi kriteria aset baik. Kriteria aset baik sebagai berikut:

- Aset keuangan diterbitkan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia; aset keuangan dijamin oleh LPS; dan/atau aset keuangan tidak memiliki tunggakan lebih dari 7 (tujuh) hari dan tidak pernah dilakukan restrukturisasi. Dalam hal BPR melakukan perpanjangan kredit tanpa melihat kemampuan membayar debitur, hal tersebut dapat menjadi indikasi bahwa kredit dimaksud tidak tergolong aset baik.

- Apabila aset keuangan memenuhi kriteria aset baik, BPR dapat tidak membentuk CKPN atas aset keuangan tersebut; aset keuangan tidak memenuhi kriteria aset baik, BPR melakukan penilaian signifikansi aset keuangan (Langkah Kedua).

Langkah Kedua: Penilaian Signifikansi

- BPR melakukan penilaian signifikansi aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria aset baik. Apabila aset keuangan signifikan, BPR melakukan penilaian terhadap aset keuangan tersebut secara individual (langkah ketiga); aset keuangan tidak signifikan, BPR membentuk CKPN secara kolektif.

Langkah Ketiga: Penilaian Individu Bukti Objektif Penurunan

- BPR melakukan penilaian secara individual terhadap aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria aset baik dan signifikan. Penilaian dilakukan dengan menganalisis apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai atas aset keuangan. Apabila terdapat bukti objektif penurunan nilai, BPR membentuk CKPN individual; tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai, BPR membentuk CKPN kolektif.

Periode evaluasi penurunan nilai, bahwa setiap akhir bulan atau paling lambat setiap akhir triwulan, BPR mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa kredit atau kelompok kredit mengalami penurunan nilai. Dalam hal BPR melakukan evaluasi setiap akhir triwulan, namun terdapat bukti objektif terjadinya penurunan nilai sebelum tanggal evaluasi berikutnya, maka BPR mengestimasi kembali arus kas masa datang dan CKPN untuk kredit tersebut.

Dalam hal terdapat kondisi sebagai berikut, bahwa BPR melakukan konsolidasi dengan kepemilikan yang sama; BPR melakukan akuisisi dan/atau penggabungan usaha; dan/atau BPR mengganti aplikasi inti perbankan atau sistem pencatatan transaksi, yang menyebabkan BPR belum dapat menyediakan data untuk perhitungan CKPN kolektif maka pembentukan CKPN kolektif dapat menggunakan *peer group* data sampai dengan BPR memiliki data historis untuk perhitungan CKPN kolektif minimal 2 (dua) tahun periode bisnis normal.

Sesuai kondisi BPR saat ini, bahwa kebijakan metode perhitungan CKPN PT BPR Lumbungartha Muntilanindo berdasarkan Surat Edaran No. 006/LAM/SK_DIR/OPS/IV/2025 Tentang Penerapan Perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Tertanggal 17 April 2025.

2) Liabilitas

Liabilitas adalah kewajiban kini BPR yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar dari sumber daya BPR. Penyelesaian kewajiban kini biasanya melibatkan pembayaran kas, pengalihan aset lain, pemberian jasa, penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain, atau konversi kewajiban menjadi ekuitas. Kewajiban juga dapat dihapuskan dengan cara seperti kreditur membebaskan atau membatalkan haknya. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.20, paragraf 2.21, dan lampiran B).

Liabilitas diakui dalam laporan posisi keuangan ketika:

- BPR memiliki kewajiban pada akhir periode pelaporan sebagai hasil dari peristiwa masa lalu;
- Kemungkinan besar BPR akan menyelesaikan liabilitas tersebut dengan menyerahkan asetnya; dan
- Nilai liabilitas dapat diukur secara andal.

2. IKTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

f. Laporan Posisi Keuangan (*Lanjutan*)

a) Simpanan

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat (di luar bank umum atau BPR lain) kepada BPR berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.

Simpanan merupakan liabilitas keuangan. Pengakuan awal sebesar nilai sekarang kas yang disampaikan ke BPR dikurangi biaya transaksi. Pengukuran selanjutnya menggunakan biaya perolehan diamortisasi. Jika tidak terdapat biaya transaksi, nilai pada umumnya sama dengan jumlah kas yang akan dibayarkan dan tidak didiskontokan.

Bentuk-bentuk simpanan berupa:

- Tabungan adalah simpanan milik pihak ketiga pada BPR yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Transaksi tabungan diakui sebesar nominal penyetoran atau penarikan yang dilakukan oleh penabung. Setoran tabungan diakui pada saat uang diterima. Bunga yang diberikan atas tabungan diakui sebagai penambah nominal tabungan. Dalam hal terdapat amortisasi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung kepada tabungan maka diakui sebagai beban bunga. Perhitungan beban bunga menggunakan suku bunga efektif. Tabungan disajikan dalam pos tersendiri pada laporan posisi keuangan sebesar jumlah kewajiban BPR kepada pemilik tabungan.

- Deposito adalah simpanan milik pihak ketiga pada BPR yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan BPR. Deposito yang dimaksud adalah deposito yang berjangka waktu. Transaksi deposito diakui sebesar nilai nominal yang tercantum dalam bilyet deposito. Setoran deposito diakui pada saat uang diterima. Bunga yang ditambahkan pada nominal deposito diakui sebagai penambah deposito. Amortisasi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung kepada deposito diakui sebagai beban bunga. Deposito disajikan dalam pos tersendiri pada laporan posisi keuangan sebesar estimasi/jumlah yang disyaratkan untuk menyelesaikan kewajiban. Kewajiban bunga deposito yang belum jatuh tempo disajikan dalam pos utang bunga.

- Bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

b) Simpanan Dari Bank Lain

Simpanan dari bank lain adalah liabilitas BPR berupa tabungan dan deposito dari bank lain di Indonesia. Simpanan dari bank lain berupa tabungan dan deposito. Simpanan dari bank lain tidak termasuk pinjaman dari bank lain yang akan dicatat pada pos pinjaman yang diterima.

Tabungan dari bank lain, bahwa transaksi tabungan diakui sebesar nominal penyetoran atau penarikan yang dilakukan oleh bank lain. Setoran tabungan diakui pada saat uang diterima. Bunga yang diberikan atas tabungan diakui sebagai penambah nominal tabungan. Tabungan disajikan dalam pos tersendiri pada laporan posisi keuangan sebesar kewajiban BPR kepada bank lain pemilik tabungan.

Deposito dari bank lain, bahwa transaksi deposito diakui sebesar nilai nominal yang tercantum dalam bilyet deposito. Setoran deposito diakui pada saat uang diterima. Bunga yang ditambahkan pada nominal deposito diakui sebagai penambah deposito. Deposito dari bank lain disajikan dalam pos tersendiri pada laporan posisi keuangan sebesar estimasi/jumlah yang disyaratkan untuk menyelesaikan kewajiban. Kewajiban bunga deposito yang belum atau yang sudah jatuh tempo disajikan dalam pos Utang Bunga.

c) Liabilitas Segera

Liabilitas segera adalah liabilitas BPR yang telah jatuh tempo dan atau yang segera dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayar. Liabilitas segera berasal dari aktivitas pendukung kegiatan operasional BPR baik terhadap masyarakat maupun terhadap bank lain. Tidak termasuk dalam liabilitas segera adalah utang bunga.

2. IKTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

f. Laporan Posisi Keuangan (*Lanjutan*)

Jenis liabilitas segera antara lain: penutupan rekening deposito jatuh tempo; titipan nasabah; selisih lebih hasil penjualan agunan milik nasabah; dividen yang belum dibayarkan; liabilitas kepada pemerintah yang harus dibayar; sanksi liabilitas membayar kepada otoritas yang belum dibayarkan; gaji/honor/upah yang telah jatuh tempo namun belum dibayarkan. Komponen-komponen tersebut apabila jumlahnya material dikelompokkan dalam pos tersendiri.

Transaksi liabilitas segera diakui pada saat liabilitas telah jatuh tempo; atau liabilitas menjadi segera dapat ditagih oleh pemiliknya baik dengan perintah dari pemberi amanat maupun tidak. Liabilitas segera dalam pos tersendiri pada laporan posisi keuangan disajikan sebesar jumlah yang harus diselesaikan.

d) Utang

- Utang Bunga

Utang bunga merupakan seluruh liabilitas BPR berupa liabilitas bunga kepada nasabah yang belum dibayarkan dari simpanan berupa tabungan maupun deposito dari pihak ketiga bukan bank dan dari bank lain, pinjaman yang diterima dari bank, serta utang bunga lain.

Termasuk dalam pengertian utang bunga adalah utang bunga yang timbul dari transaksi lainnya, seperti pinjaman yang diterima, dan pinjaman subordinasi. Utang bunga antara lain terdiri dari Liabilitas bunga yang telah menjadi beban BPR tetapi belum dibayar (akrual bunga). Bunga deposito yang telah jatuh tempo namun belum diambil oleh nasabah. Bunga dari transaksi lainnya yang sudah jatuh tempo namun belum diambil.

Utang bunga diakui sebesar jumlah bunga kontraktual, baik untuk akrual bunga maupun yang telah jatuh tempo. Penyajian Utang bunga disajikan sebesar jumlah yang harus diselesaikan.

- Utang Pajak

Utang pajak adalah liabilitas pajak penghasilan badan yang terutang atas penghasilan BPR.

Dasar Pengaturan Utang Pajak ada pada SAK EP Bab 29 tentang Pajak Penghasilan dan juga PA BPR Bab XXIV tentang Beban Pajak Penghasilan dan Pajak Tangguhan.

Utang pajak mencakup utang pajak atas PPh Pasal 29 (PPh Badan) yang dihitung setelah berakhir masa pajak tahunan, yaitu selisih kurang kewajiban pajak penghasilan BPR setelah memperhitungkan PPh Pasal 25 (angsuran pajak atau pajak dibayar di muka); dan/atau utang pajak yang telah ditetapkan oleh kantor pajak.

Utang Pajak diakui sebesar jumlah yang harus disetorkan ke kas negara. Penyajian Utang Pajak disajikan sebesar jumlah yang harus diselesaikan.

e) Pinjaman

Pinjaman yang diterima adalah pinjaman yang diterima dari bank, Bank Indonesia dan/atau pihak ketiga bukan bank dengan kewajiban pembayaran kembali berdasarkan persyaratan perjanjian utang piutang. Pinjaman subordinasi adalah pinjaman yang memenuhi kriteria subordinasi, antara lain bersifat yunior dan memiliki kedudukan yang hampir sama dengan modal.

Pengukuran awal yaitu pinjaman diakui sebesar nilai sekarang kas terutang (sebagai contoh, termasuk pembayaran bunga dan pelunasan pokok). (Hal ini mengacu pada SAK EP Paragraf 11.13). Pengukuran selanjutnya pinjaman diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

2. IKTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

f. Laporan Posisi Keuangan (*Lanjutan*)

Pinjaman diterima dapat berasal dari bank umum, BPR lain, Bank Indonesia, atau pihak lain. Pinjaman diterima yang berasal dari Bank Indonesia berupa fasilitas pendanaan jangka pendek untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek yang dialami oleh BPR. Jenis pinjaman yang diterima antara lain: pinjaman bilateral; pinjaman sindikasi; pinjaman subordinasi; dan pinjaman khusus yang diterima dari lembaga pengayom maupun pinjaman dalam rangka linkage. Dalam ketentuan permodalan, pinjaman subordinasi masuk sebagai pinjaman dengan persyaratan tertentu sebagaimana POJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR. Pinjaman yang diterima tidak termasuk: setoran keikutsertaan bank lain (bank peserta) dalam kredit sindikasi (pembiayaan bersama); atau dana yang diterima dalam rangka penerusan kredit (*channeling*).

Pinjaman yang diterima diakui sebesar nilai pokok pinjaman ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan pinjaman, dikurangi bunga dibayar di muka jika ada (diskonto). Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung kepada perolehan pinjaman dan diskonto diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dan diakui sebagai beban bunga. Bunga akrual atas pinjaman diterima diakui sebagai utang bunga. Penyajian Pinjaman yang diterima disajikan dalam pos tersendiri pada laporan posisi keuangan sebesar saldo pinjaman yang belum dilunasi pada tanggal laporan serta biaya transaksi dan diskonto yang belum diamortisasi. Bunga yang masih harus dibayar disajikan dalam pos utang bunga. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik oleh BPR disajikan sebagai tagihan komitmen pada pos fasilitas pinjaman diterima yang belum ditarik. Penempatan BPR berupa giro pada bank umum yang bersaldo kredit (*overdraft*) disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai pinjaman diterima.

f) Dana Setoran Modal-Liabilitas

Dana Setoran Modal (DSM) – Liabilitas adalah dana yang telah disetor penuh oleh pemegang saham atau calon pemegang saham dan diblokir untuk penambahan modal, namun belum memenuhi ketentuan permodalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DSM – Liabilitas tidak memenuhi kriteria instrumen ekuitas karena masih terdapat unsur ketidakpastian di mana BPR tetap memiliki liabilitas kontraktual sehingga harus mengembalikan dana tersebut apabila tidak memenuhi ketentuan untuk diakui sebagai modal disetor sesuai dengan POJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum Bank Perkonomian Rakyat. DSM yang dinyatakan tidak memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku merupakan kewajiban BPR kepada penysetor. Dana setoran modal yang telah dinyatakan memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku merupakan bagian dari ekuitas BPR.

Dana setoran modal yang diterima diakui sebagai DSM - Liabilitas. DSM - Liabilitas yang dinyatakan telah memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku diakui sebagai DSM - Ekuitas. Penyajian DSM – Liabilitas disajikan dalam pos tersendiri pada laporan posisi keuangan.

g) Liabilitas Imbalan Kerja

Imbalan kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan BPR atas jasa yang diberikan oleh pekerja, termasuk direktur dan manajemen. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 28.1)b. Liabilitas imbalan kerja adalah liabilitas yang timbul dari imbalan kerja.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PT BPR LUMBUNGARTHA MUNTILANINDO**

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

f. Laporan Posisi Keuangan (*Lanjutan*)

Liabilitas imbalan kerja terdiri dari: imbalan kerja jangka pendek; imbalan pasca kerja; imbalan kerja jangka panjang lainnya; dan pesangon. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 28.1)

Liabilitas imbalan kerja jangka pendek: Secara umum diakui sebesar jumlah tidak terdiskonto (*undiscounted amount*). (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 28.5)

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang diakui sebesar jumlah terdiskonto (*discounted amount*).

Khusus untuk liabilitas imbalan pasca kerja program imbalan pasti dan liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya, BPR mengukur liabilitas pada total neto dari jumlah nilai kini liabilitas imbalan, dikurangi nilai wajar aset program (jika ada), pada tanggal pelaporan. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 28.15 dan 28.30).

Khusus untuk pesangon, BPR mengakui pesangon sebagai beban dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain karena pesangon tidak memberikan manfaat ekonomik kepada BPR di masa depan. Pesangon diakui sebagai liabilitas dan beban hanya ketika BPR menunjukkan komitmennya untuk melakukan pemberhentian kontrak kerja sebelum tanggal pensiun normal, yang ditunjukkan dengan rencana formal terperinci untuk menghentikan pekerja dan tidak terdapat kemungkinan yang realistis untuk membatalkan rencana tersebut; atau memberikan pesangon sebagai hasil dari penawaran yang dilakukan untuk mendorong pengurangan tenaga kerja secara sukarela. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 28.34 dan 28.35)2). BPR mengukur pesangon pada estimasi terbaik dari pengeluaran untuk menyelesaikan kewajiban. Jika pesangon diberikan untuk mendorong pengurangan tenaga kerja secara sukarela, pengukuran pesangon didasarkan pada jumlah pekerja yang diperkirakan akan menerima tawaran tersebut. Jika pesangon jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, pesangon diukur pada nilai sekarang terdiskonto. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 28.36 dan 28.37).

Penyajian Liabilitas imbalan kerja jangka pendek disajikan dalam pos Liabilitas segera pada laporan posisi keuangan. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang disajikan dalam pos liabilitas lainnya pada laporan posisi keuangan.

h) Liabilitas Lainnya

Liabilitas lainnya merupakan pos yang mencakup liabilitas BPR yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu pos liabilitas yang ada dan tidak cukup material untuk disajikan dalam pos tersendiri.

Termasuk dalam liabilitas lainnya antara lain dana yang diterima BPR dari pihak ketiga bukan bank dalam rangka penerusan kredit tetapi belum disalurkan kepada nasabah dan liabilitas imbalan kerja jangka panjang.

Pengakuan dan Pengukuran Liabilitas lainnya diakui dalam hal BPR menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut dan pada umumnya diukur sebesar jumlah yang harus diselesaikan. Penyajian Liabilitas lainnya disajikan dalam pos Liabilitas lain-lain pada laporan posisi keuangan.

3) Ekuitas

Ekuitas adalah hak residual atas aset BPR setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. BPR mengklasifikasikan instrumen keuangan sebagai liabilitas keuangan atau sebagai ekuitas sesuai dengan substansi pengaturan kontraktualnya (*substance over form*). (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 22.3 dan 22.4).

a) Modal

Modal Dasar adalah seluruh nilai nominal saham sesuai dengan anggaran dasar.

Modal Disetor adalah modal yang telah disetor secara riil dan efektif diterima BPR.

Agio yaitu selisih lebih tambahan modal yang diterima BPR sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.

Modal sumbangan yaitu modal yang diterima BPR yang berasal dari sumbangan dalam bentuk dana atau aset lainnya.

2. IKTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

f. Laporan Posisi Keuangan (*Lanjutan*)

b) DSM (Dana Setoran Modal) Ekuitas

DSM – Ekuitas yaitu dana yang telah disetor secara riil untuk tujuan penambahan modal namun belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor seperti Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota maupun pengesahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang. Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh. (Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Perlakuan terhadap modal dilakukan sesuai ketentuan permodalan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Undang-Undang terkait perseroan terbatas, Undang-Undang terkait koperasi, POJK mengenai BPR, dan POJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR.

Modal disetor diakui pada saat BPR menerima setoran modal baik berupa dana kas maupun aset non-kas untuk selanjutnya diukur pada nilai wajar yang telah dikurangi biaya transaksi, jika ada. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 22.7 dan 22.8).

c) Saldo Laba

Saldo laba (laba ditahan) adalah akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian dividen, koreksi laba rugi periode lalu, dan reklasifikasi surplus revaluasi aset tetap (yang telah masuk sebagai bagian saldo laba).

Saldo laba umumnya dikelompokkan menjadi:

1. Cadangan umum yaitu cadangan yang dibentuk dari laba netto setelah pajak yang dimaksudkan untuk memperkuat modal dan telah mendapat persetujuan RUPS.
2. Cadangan tujuan yaitu cadangan yang dibentuk dari laba netto setelah pajak yang tujuan penggunaannya telah ditetapkan dan telah mendapat persetujuan RUPS.
3. Saldo laba yang belum ditentukan tujuannya, terdiri dari:
 - a) laba tahun lalu yang belum ditetapkan penggunaannya; dan
 - b) laba tahun berjalan.

Seluruh saldo laba dianggap bebas untuk dibagikan sebagai dividen dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan pembagian dividen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saldo laba yang tidak tersedia untuk dibagikan sebagai dividen karena pembatasan-pembatasan dilaporkan dalam pos tersendiri yang menggambarkan tujuan pencadangan yang dimaksud.

g. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

1) Penghasilan dan Beban

Penghasilan diakui BPR dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ketika telah terjadi peningkatan manfaat ekonomik masa depan terkait peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang dapat diukur secara andal. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.41).

Penghasilan terdiri dari:

a) Pendapatan Operasional

Pendapatan operasional adalah semua pendapatan yang berasal dari kegiatan utama BPR. Pendapatan operasional terdiri dari pendapatan bunga, yaitu pendapatan dari penanaman dana BPR dalam bentuk aset produktif; dan pendapatan lainnya, yaitu seluruh pendapatan operasional yang diperoleh BPR selain pendapatan bunga, sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai laporan bulanan bank perekonomian rakyat.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PT BPR LUMBUNGARTHA MUNTILANINDO**

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

g. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain (*Lanjutan*)

Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga dari perjanjian kredit diakui secara akrual, yaitu dampak dari transaksi dan peristiwa lainnya yang diakui secara akrual, yaitu dampak dari transaksi dan peristiwa lainnya yang diakui pada saat terjadinya (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan) dan dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang terkait.

Pendapatan Bunga terdiri dari:

- Pendapatan bunga kontraktual, yaitu pendapatan bunga yang diterima oleh BPR sesuai dengan perjanjian dengan pihak lain atas surat berharga, penempatan pada bank lain, atau kredit yang diberikan (tidak termasuk amortisasi provisi atau biaya transaksi);
- Provisi kredit, yaitu pendapatan yang diterima BPR atas

Provisi diamortisasi selama masa kredit dengan menggunakan suku bunga efektif. Amortisasi provisi tersebut diakui sebagai penambah pendapatan bunga.

Amortisasi provisi dilakukan tanpa memperhatikan apakah kredit termasuk performing atau non-performing.

Pada saat kredit non-performing, BPR mengakui pendapatan dari amortisasi provisi.

- Biaya transaksi, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh BPR yang terkait secara langsung dengan penempatan sertifikat Bank Indonesia, penempatan pada bank lain serta kredit yang diberikan. Biaya transaksi mencakup semua biaya tambahan yang terkait secara langsung dengan pemberian kredit yang ditanggung oleh BPR, misalnya marketing fee. Dalam hal biaya transaksi dibebankan kepada nasabah maka biaya tersebut tidak termasuk dalam biaya perolehan pemberian kredit; dan

Biaya transaksi dalam rangka pemberian kredit yang ditanggung oleh BPR diamortisasi selama masa kredit dengan menggunakan suku bunga efektif. Amortisasi biaya transaksi tersebut diakui sebagai pengurang pendapatan bunga.

Amortisasi Biaya transaksi dilakukan tanpa memperhatikan apakah kredit termasuk performing atau non-performing. Pada saat kredit non-performing, BPR mengakui pendapatan dari amortisasi biaya transaksi.

- Koreksi pendapatan bunga, yaitu koreksi pendapatan bunga akrual atas aset produktif yang mengalami penurunan kualitas atau penurunan nilai, sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai laporan bulanan bank perekonomian rakyat.

Pendapatan Lainnya

Pendapatan lainnya berasal dari kegiatan jasa yang mendukung operasional BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai laporan bulanan bank perekonomian rakyat. Bentuk pendapatan lainnya antara lain:

- Pendapatan jasa transaksi (seperti payment point)
- Keuntungan dari penjualan valuta asing;
- Keuntungan penjualan surat berharga;
- Penerimaan aset produktif yang dihapus buku;
- Pemulihan CKPN aset keuangan;
- Dividen;
- Keuntungan dari penyertaan dengan equity method;
- Keuntungan penjualan AYDA;
- Pendapatan ganti rugi asuransi; dan
- Pemulihan penurunan nilai AYDA.

Pendapatan lainnya diakui pada saat memenuhi persyaratan sebesar jumlah yang menjadi hak BPR.

b) Beban Operasional

Beban operasional adalah semua beban yang dikeluarkan atas kegiatan usaha utama BPR.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PT BPR LUMBUNGARTHA MUNTILANINDO**

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

g. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain (*Lanjutan*)

Beban diakui BPR dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ketika telah terjadi penurunan manfaat ekonomis masa depan terkait penurunan aset atau peningkatan liabilitas yang dapat diukur secara andal. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.42).

Beban operasional diakui secara akrual, yaitu dampak daritransaksi dan peristiwa lainnya yang diakui pada saat terjadinya (dan bukan pada saat kas atau setara kas dibayarkan) dan dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang terkait.

Beban Operasional terdiri dari:

- Beban Bunga

Beban bunga, yaitu beban bunga atas kegiatan penghimpunan dana atau penerimaan pinjaman BPR, seperti tabungan atau deposito, pinjaman dari Bank Indonesia atau bank lain. Beban bunga termasuk amortisasi biaya transaksi dan provisi pinjaman yang diterima serta amortisasi biaya promosi yang dapat diatribusikan secara langsung pada rekening tabungan atau deposito. Beban bunga antar kantor tidak dilaporkan pada pos ini tetapi dilaporkan pada pos beban non operasional sesuai ketentuan OJK mengenai laporan bulanan bank perekonomian rakyat;

- Beban kerugian restrukturisasi kredit

Beban kerugian restrukturisasi kredit, yaitu amortisasi cadangan kerugian yang timbul atas penurunan nilai kredit akibat restrukturisasi setelah diperhitungkan dengan kelebihan CKPN aset keuangan karena perbaikan kualitas kredit dalam rangka restrukturisasi;

- Beban kerugian penurunan nilai

Beban kerugian penurunan nilai, yaitu CKPN aset produktif antara lain berupa kredit yang diberikan, surat berharga yang dimiliki, dan penempatan pada bank lain. Detil mengenai kerugian penurunan nilai dapat merujuk standar akuntansi keuangan mengenai instrumen dasar. Pembentukan beban kerugian penurunan nilai sebesar nilai tercatat kredit yang diberikan tidak semata merupakan penghentian pengakuan karena BPR masih memiliki hak kontraktual atas penerimaan arus kas masadatang yang berasal dari kredit yang diberikan;

Beban kerugian penurunan nilai pada setiap akhir periode pelaporan, BPR mengakui dan mengukur berdasarkan bukti objektif. Jika pada periode berikutnya, jumlah beban kerugian penurunan nilai menurun, maka BPR menyajikan jumlah perbaikan pada pemulihan CKPN pada pendapatan operasional lainnya.

- Beban pemasaran

Beban pemasaran, yaitu biaya yang berkaitan dengan promosi produk perbankan BPR antara lain biaya edukasi terhadap masyarakat tentang produk perbankan BPR, biaya pemberian hadiah yang tidak dapat diatribusikan langsung pada rekening nasabah, dan biaya iklan untuk promosi;

- Beban penelitian dan pengembangan

Beban penelitian dan pengembangan, yaitu biaya yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh BPR. Termasuk pada pos ini yaitu: (1) biaya perjalanan dan akomodasi terkait dengan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh BPR, (2) biaya penelitian dan pengembangan untuk pendirian dan pembukaan kantor cabang BPR, dan (3) beban pengeluaran yang terjadi secara internal pada suatu item aset tak berwujud;

- Beban administrasi dan umum

Beban administrasi dan umum, termasuk beban tenaga kerja, beban pendidikan & pelatihan, beban sewa, beban penyusutan/penghapusan atas aset tetap & inventaris, beban amortisasi aset tak berwujud, beban premi asuransi, beban pemeliharaan dan perbaikan, beban barang & jasa, beban penyelenggaraan, teknologi informasi, kerugian terkait risiko operasional, dan pajak-pajak;

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PT BPR LUMBUNGARTHA MUNTILANINDO**

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

g. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain (*Lanjutan*)

- Beban lainnya

Beban lainnya, yaitu beban operasional lainnya termasuk kerugian penjualan valuta asing, kerugian penjualan surat berharga, kerugian dari penyertaan dengan equity method, kerugian penjualan AYDA, kerugian penurunan nilai AYDA, dan biaya pungutan OJK.

Beban - beban lain seperti beban pemasaran, beban penelitian dan pengembangan, dan beban administrasi dan umum diakui pada saat terjadinya (dan bukan pada saat kas atau setara kas dibayarkan) dan dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang terkait.

2) Pendapatan dan Beban Non Operasional

a) Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non operasional merupakan semua pendapatan yang berasal dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai laporan bulanan bank perekonomian rakyat.

Pendapatan Non operasional diakui sebesar jumlah yang menjadi hak BPR. BPR mengakui pendapatan Non operasional menggunakan dasar akuntansi akrual, yaitu diakui ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk akun tersebut.

Pendapatan Non Operasional terdiri dari:

- Keuntungan penjualan, yaitu keuntungan karena penjualan aset tetap dan inventaris milik BPR;
- Pemulihan penurunan nilai, termasuk penurunan nilai wajar atas aset tetap dan inventaris milik BPR yang sebelumnya telah mengalami penurunan nilai;
- Bunga antar kantor, yaitu pendapatan bunga yang berasal dari transaksi antar kantor. Pelaporan pendapatan bunga antar kantor untuk laporan perkantor dilaporkan secara tidak saling hapus dengan beban bunga antar kantor (*gross*), sedangkan untuk laporan gabungan disajikan secara saling hapus (*offsetting/net*);
- Selisih kurs, yaitu keuntungan selisih kurs berupa selisih lebih antara nilai tercatat mata uang asing berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan dengan nilai tercatat sebelumnya;
- Pendapatan lainnya, yaitu seluruh pendapatan operasional yang diperoleh BPR selain pendapatan bunga yang tidak dapat dikelompokkan seperti di atas. Termasuk pada pos ini yaitu pendapatan yang diperoleh atas penerimaan kembali aset produktif yang telah dihapus tagih; sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai laporan bulanan bank perekonomian rakyat.

b) Beban Non Operasional

Beban Non operasional adalah semua beban yang berasal dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama BPR.

Beban non operasional diakui pada saat terjadinya sebesar jumlah yang harus diselesaikan.

Beban Non Operasional terdiri dari:

- Kerugian penjualan/kehilangan, yaitu kerugian karena penjualan atau kehilangan aset tetap dan inventaris milik BPR;
- Kerugian penurunan nilai, yaitu kerugian atas penurunan nilai wajar aset tetap dan inventaris milik BPR;
- Bunga antar kantor, yaitu beban bunga atas dana yang berasal dari transaksi antar kantor. Pelaporan beban bunga antar kantor untuk keperluan laporan keuangan bertujuan umum secara gabungan disajikan secara saling hapus (*offsetting/net*);
- Selisih kurs, yaitu kerugian selisih kurs berupa selisih kurang antara nilai tercatat mata uang asing berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan dengan nilai tercatat sebelumnya; dan
- Beban lainnya, termasuk sanksi administratif berupa denda karena suatu pelanggaran dan sumbangan yang diberikan BPR.

2. IKTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

g. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain (*Lanjutan*)

3) Beban Pajak Penghasilan dan Pajak Tangguhan

a) Pajak Kini

Pajak kini adalah pajak penghasilan terutang (dapat dipulihkan) terkait dengan laba kena pajak (rugi pajak) untuk periode berjalan atau periode lain. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 29.1)

Beban pajak penghasilan diakui dalam laporan laba rugi BPR sebagai bagian dari biaya operasional. Pengakuan ini harus dilakukan pada periode pelaporan yang sesuai dengan prinsip akrual, yaitu beban pajak harus diakui pada saat pendapatan diperoleh atau biaya terjadi, bukan pada saat pembayaran dilakukan.

Beban pajak penghasilan diukur berdasarkan tarif pajak yang berlaku pada periode pelaporan yang bersangkutan. Tarif pajak yang digunakan dapat berbeda tergantung pada jenis pendapatan atau pengeluaran, serta peraturan pajak yang berlaku.

b) Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan adalah pajak penghasilan terutang atau dapat dipulihkan pada periode mendatang, umumnya sebagai hasil dari BPR memulihkan atau menyelesaikan aset dan liabilitas pada jumlah tercatat kini, dan dampak pajak dari akumulasi rugi pajak kini belum dikompensasi dan kredit pajak kini belum dimanfaatkan. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 29.1)

Aset pajak tangguhan diakui ketika terdapat perbedaan temporer dapat dikurangkan di masa depan. Perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas dalam laporan posisi keuangan dan dasar pengenaan pajaknya. Aset pajak tangguhan juga diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 29.12 dan 29.21)

Liabilitas pajak tangguhan diakui ketika terdapat perbedaan temporer kena pajak.

Liabilitas dan aset pajak tangguhan diukur menggunakan tarif pajak dan undang-undang pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

4) Laporan Penghasilan Komprehensif Lain

Penghasilan komprehensif lain adalah item penghasilan dan beban (termasuk penyesuaian reklasifikasi) yang tidak diakui dalam laba rugi yang disyaratkan atau diizinkan oleh standar akuntansi keuangan.

Penghasilan komprehensif lain timbul dari poin dalam SAK EP Bab 5 Paragraf 5.4 (b). Umumnya pada BPR yang relevan hanya terkait surplus revaluasi aset tetap. Surplus revaluasi aset tetap tidak direklasifikasikan ke laba rugi. Umumnya pada BPR yang relevan hanya terkait surplus revaluasi aset tetap bila BPR memilih kebijakan akuntansi revaluasi untuk aset tetapnya (lihat bab IX tentang Aset Tetap dan Inventaris). Surplus revaluasi aset tetap tidak direklasifikasikan ke laba rugi.

h. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menyediakan informasi perubahan kas dan setara kas BPR untuk periode pelaporan. Laporan arus kas menunjukkan secara terpisah penerimaan dan pengeluaran kas BPR dari aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 7.1)

Aktivitas operasi adalah aktivitas utama yang menghasilkan pendapatan bagi BPR dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan.

Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas.

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang timbul dari perubahan dalam ukuran dan komposisi ekuitas dan pinjaman BPR yang berkontribusi.

2. IKTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

h. Laporan Arus Kas (*Lanjutan*)

BPR menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode langsung, dengan metode ini pos-pos utama dari penerimaan kas bruto dan pembayaran kas bruto diungkapkan. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 7.7)

a. Kas terdiri atas:

- 1) kas dalam rupiah dan kas dalam valuta asing;
- 2) rekening giro pada bank lain;
- 3) tabungan pada bank atau BPR lain.

b. Setara kas, antara lain:

- 1) surat berharga dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan;
- 2) deposito dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

i. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang menyajikan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk suatu periode, item penghasilan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, dampak perubahan dalam kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui pada periode tersebut dan (tergantung pada format laporan dari perubahan ekuitas yang dipilih oleh BPR) jumlah transaksi dengan pemilik yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai pemilik selama periode tersebut.

j. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan BPR. Catatan atas laporan keuangan memuat penjelasan mengenai gambaran umum BPR, ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos laporan keuangan dan informasi penting lainnya.

k. Instrumen Keuangan

- Instrumen keuangan adalah kontrak yang menimbulkan aset keuangan pada BPR dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas pada entitas lainnya. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 11.3).
- BPR mengklasifikasikan instrumen keuangan sebagai liabilitas keuangan atau ekuitas keuangan sesuai dengan substansi pengaturan kontraktualnya dan tidak hanya dari bentuk hukumnya (substance over form). (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 22.3A).
- Instrumen keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan jika BPR harus menyelesaikan kewajiban kontraktualnya melalui penyerahan kas atau aset lain. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 22.3A).

l. Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode perhitungan biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan dan metode pengalokasian penghasilan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama umur instrumen keuangan ke jumlah tercatat aset atau liabilitas keuangan tersebut. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 11.16).

m. Pengukuran Aset Non Keuangan dan Liabilitas Non Keuangan

Pada pengakuan awal, BPR mengukur aset dan liabilitas pada biaya historis kecuali SAK EP mensyaratkan pengukuran awal dengan dasar lainnya seperti nilai wajar. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.46). Selanjutnya aset dan liabilitas diukur dengan dasar pengukuran lainnya sebagai berikut:

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PT BPR LUMBUNGARTHA MUNTILANINDO**

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

m. Pengukuran Aset Non Keuangan dan Liabilitas Non Keuangan (*Lanjutan*)

- Semisal Aset Tetap yaitu dengan model biaya, diukur pada yang lebih rendah antara biaya perolehan dikurangi akumulasi depresiasi dan akumulasi penurunan nilai dengan jumlah terpulihkan; atau Model revaluasi, diukur pada yang lebih rendah antara jumlah revaluasi dan jumlah terpulihkan.
- BPR mengakui kerugian penurunan nilai terkait aset nonkeuangan yang digunakan atau dikuasai untuk dijual, sebagai contoh aset yang diambil alih.
- SAK EP mengizinkan atau mensyaratkan pengukuran pada nilai wajar untuk: investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama yang diukur BPR pada nilai wajar; properti investasi yang diukur BPR pada nilai wajar; dan aset tetap yang diukur BPR dengan model revaluasi. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.50).
- Kebanyakan liabilitas selain liabilitas keuangan diukur pada estimasi terbaik atas jumlah yang disyaratkan untuk menyelesaikan kewajiban pada tanggal pelaporan. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.51).

n. Pengukuran Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Pada pengakuan awal, BPR mengukur aset dan liabilitas keuangan pada biaya historis kecuali SAK EP mensyaratkan pengukuran awal dengan dasar lainnya seperti nilai wajar. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.46) Selanjutnya aset dan liabilitas diukur dengan dasar pengukuran lainnya sebagai berikut:

- BPR mengukur aset keuangan dasar dan liabilitas keuangan dasar pada biaya perolehan diamortisasi (*amortised cost*) dikurangi penurunan nilai. Pengukuran ini dikecualikan untuk: investasi dalam saham preferen yang tidak dapat dikonversi; dan saham biasa atau saham preferen tanpa opsi jual yang diperdagangkan secara publik atau yang nilai wajarnya dapat diukur dengan andal tanpa biaya atau upaya yang berlebihan. Investasi dan saham di atas diukur pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.47).
- Aset keuangan dan liabilitas keuangan lainnya diukur pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi kecuali disyaratkan lain oleh SAK EP. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.48)
- Biaya perolehan diamortisasi aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah nilai bersih dari: jumlah saat pengakuan awal; dikurangi setiap pelunasan pokok; ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif dengan menggunakan metode suku bunga efektif; dan dikurangi penurunan nilai (untuk aset keuangan). (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 11.15).

o. Saling Hapus

- BPR tidak diperbolehkan melakukan saling hapus aset dan liabilitas atau penghasilan dan beban. Saling hapus hanya diperbolehkan dalam rangka penyajian untuk transaksi yang memiliki sifat yang sama, sebagai contoh keuntungan selisih kurs dan kerugian selisih kurs.
- Pengukuran aset secara neto dengan nilai penyisihan bukan merupakan saling hapus.
- Jika aktivitas operasi normal BPR tidak mencakup pembelian atau penjualan aset tidak lancar, maka BPR melaporkan Keuntungan dan kerugian pelepasan aset tersebut dengan cara mengurangi hasil pelepasan dengan jumlah tercatat asetnya dan beban penjualan terkait.
(Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.52)

p. Penyajian Kembali Laporan Keuangan

Atas diberlakukannya SAK EP per 1 Januari 2025, BPR menentukan penerapan dengan kondisi prospektif dan kondisi praktis. BPR menyajikan saldo akhir 31 Desember 2024 sesuai SAK EP dengan menuliskan keterangan bahwa saldo dimaksud merupakan saldo sesuai SAK EP. Tabel dibawah ini memperlihatkan dampak penyesuaian atas penyajian kembali terhadap laporan keuangan:

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PT BPR LUMBUNGARTHA MUNTILANINDO
Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (*LANJUTAN*)
p. Penyajian Kembali Laporan Keuangan (*Lanjutan*)

Laporan Keuangan - Neraca	31 Des 2024 SAK ETAP	Penyesuaian SAK EP	31 Des 2024 SAK EP
Pendapatan Bunga yang Akan Diterima	175.791.357	(175.791.357)	-
Aset Lain - Lain - PBYAD Penempatan pada Bank	-	5.830.644	5.830.644
Aset Lain - Lain - PBYAD Kredit Yang Diberikan	-	169.960.713	169.960.713
PPKA - Kredit Yang Diberikan	(1.229.804.002)	1.229.804.002	-
CKPN - Kredit Yang Diberikan	-	(1.229.804.002)	(1.229.804.002)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**PT. BPR LUMBUNGARTHA MUNTILANINDO**

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Des 2025	31 Des 2024
3. Kas		
Akun ini terdiri dari		
Kas	102.044.900	104.651.600
Jumlah Kas	102.044.900	104.651.600
4. Penempatan pada Bank Lain		
Akun ini terdiri dari:		
<u>Giro</u>		
PT Bank BDI-221.354.95	346.877.450	940.520.561
PT Bank BRI (025101-00157430-4)	1.369.323.704	827.555.072
Jumlah Giro	1.716.201.154	1.768.075.633
<u>Tabungan</u>		
PT Bank Mandiri (136-00-0568689-1)	627.983.173	802.049.331
PT Bank BNI 46 (211567232)	982.566.764	781.320.539
PT Bank Jateng (2-038-01154-8)	408.205.068	407.683.206
PT BPR Artha Berkah Cemerlang (31011169)	21.353.594	20.942.990
Jumlah Tabungan	2.040.108.599	2.011.996.066
<u>Deposito</u>		
PT BPR Lawu Artha (001-30-00126)	-	500.000.000
PT BPRS Unisia Insan Indonesia (3410100023)	-	500.000.000
PT BPR Alto Makmur (AM-00833)	-	300.000.000
PT BPR Alto Makmur (AM-01063)	-	200.000.000
PT BPRS Margirizki Bahagia (3320100034)	-	500.000.000
PT BPR DP Taspen (013198)	500.000.000	-
PT BPR DP Taspen (013198)	500.000.000	-
PT BPRS Formes (0001099)	-	500.000.000
PT BPRS Formes (0001098)	-	500.000.000
Jumlah Deposito	1.000.000.000	3.000.000.000
Jumlah	4.756.309.752	6.780.071.699
<u>Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Penempatan pada Bank Lain</u>	-	-
Jumlah Penempatan pada Bank Lain	4.756.309.752	6.780.071.699

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PT. BPR LUMBUNGARTHA MUNTILANINDO

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Des 2025	31 Des 2024
5. Kredit yang Diberikan		
Akun ini terdiri dari:		
a. Jenis Kredit		
Kredit Investasi	2.937.293.530	1.581.507.993
Kredit Konsumtif	4.382.088.501	5.381.122.443
Kredit Modal Kerja	17.545.270.772	13.716.556.080
Provisi Kredit, Adm. & By Transaksi	(131.851.483)	(112.089.902)
Pendapatan Ditangguhkan Restrukturisasi	(5.795.138)	(5.795.138)
Cadangan Kerugian Restrukturisasi	(54.684.857)	-
Jumlah	24.672.321.325	20.561.301.476
Penyisihan Penilaian Kualitas Aset - Kredit Yang Diberikan	-	(1.229.804.002)
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Kredit Yang Diberikan	(1.075.770.284)	-
Jumlah Kredit yang Diberikan	23.596.551.041	19.331.497.474
b. Kolektabilitas		
Lancar	13.100.594.572	11.377.403.328
Dalam Perhatian Khusus	4.590.344.780	1.532.631.262
Kurang Lancar	617.330.032	497.152.661
Diragukan	713.114.511	773.759.878
Macet	5.843.268.908	6.498.239.387
Provisi Kredit, Adm. & By Transaksi	(131.851.483)	(112.089.902)
Pendapatan Ditangguhkan Restrukturisasi	(5.795.138)	(5.795.138)
Cadangan Kerugian Restrukturisasi	(54.684.857)	-
Jumlah	24.672.321.325	20.561.301.476
Penyisihan Penilaian Kualitas Aset - Kredit Yang Diberikan	-	(1.229.804.002)
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Kredit Yang Diberikan	(1.075.770.284)	-
Jumlah Kredit yang Diberikan	23.596.551.041	19.331.497.474
c. Keterkaitannya		
Pihak Terkait	22.072.367	32.069.752
Pihak Tidak Terkait	24.842.580.436	20.647.116.764
Provisi Kredit, Adm. & By Transaksi	(131.851.483)	(112.089.902)
Pendapatan Ditangguhkan Restrukturisasi	(5.795.138)	(5.795.138)
Cadangan Kerugian Restrukturisasi	(54.684.857)	-
Jumlah	24.672.321.325	20.561.301.476
Penyisihan Penilaian Kualitas Aset - Kredit Yang Diberikan	-	(1.229.804.002)
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Kredit Yang Diberikan	(1.075.770.284)	-
Jumlah Kredit yang Diberikan	23.596.551.041	19.331.497.474

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PT. BPR LUMBUNGARTHA MUNTILANINDO

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Des 2025	31 Des 2024		
6. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif				
Akun ini terdiri dari:				
Saldo awal tahun	(1.233.317.456)	(358.976.703)		
Pembentukan/(Pemulihan) selama tahun	1.533.682.274	903.648.611		
Penghapus bukuan kredit yang diberikan	(1.376.135.102)	(1.777.989.363)		
Jumlah Saldo Akhir Tahun	(1.075.770.284)	(1.233.317.456)		
7. Agunan yang Diambil Alih				
Akun ini terdiri dari:				
Agunan yang Diambil Alih	700.000.000	700.000.000		
Jumlah Agunan yang Diambil Alih	700.000.000	700.000.000		
8. Aset Tetap dan Inventaris				
Akun ini terdiri dari:				
31 Desember 2025	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Harga Perolehan:				
Inventaris Kantor	631.855.060	20.735.000	4.350.000	648.240.060
Kendaraan	108.205.000	-	73.575.000	34.630.000
Jumlah Harga Perolehan	740.060.060	20.735.000	77.925.000	682.870.060
Akumulasi Penyusutan				
Akm Peny Inventaris Kantor	603.159.577	17.761.009	4.350.000	616.570.586
Akm Peny Kendaraan	108.204.994	4	73.575.000	34.629.998
Jumlah Akm Penyusutan	711.364.571	17.761.013	77.925.000	651.200.584
Nila Buku Aset Tetap	28.695.489			31.669.476
31 Desember 2024	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Harga Perolehan:				
Inventaris Kantor	624.795.060	7.060.000	-	631.855.060
Kendaraan	108.205.000	-	-	108.205.000
Jumlah Harga Perolehan	733.000.060	7.060.000	-	740.060.060
Akumulasi Penyusutan				
Akm Peny Inventaris Kantor	581.635.261	21.577.960	53.644	603.159.577
Akm Peny Kendaraan	108.204.994	-	-	108.204.994
Jumlah Akm Penyusutan	689.840.255	21.577.960	53.644	711.364.571
Nila Buku Aset Tetap	43.159.805			28.695.489

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**PT. BPR LUMBUNGARTHA MUNTILANINDO**

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Des 2025	31 Des 2024
9. Aset Tidak Berwujud		
Akun ini terdiri dari:		
Program IT	117.500.000	117.500.000
Akumulasi Program IT Software	(117.499.998)	(117.499.998)
Jumlah Aset Tidak Berwujud	2	2
10. Aset Lain-lain		
Akun ini terdiri dari:		
Sewa kantor	125.500.000	186.083.335
Ditangguhkan Lainnya	8.887.550	25.135.908
Dimuka Lainnya	11.000.000	11.000.000
Pendapatan Bunga yang Akan Diterima - Penempatan pada Bank Lain	1.451.612	5.830.644
Pendapatan Bunga yang Akan Diterima - Kredit	306.427.241	169.960.713
Benda Pos	600.000	600.000
Lainnya	164.108.415	113.886.000
Jumlah Aset Lain-lain	617.974.818	512.496.600
11. Liabilitas Segera		
Akun ini terdiri dari:		
KS-Tabungan Berjangka JT Belum ditarik nasabah		
KS-Tabungan Simapan	972.177	972.177
KS-Tabungan Arisan	16.000.000	16.600.000
KS-Tabungan Lubero Extra	10.900.000	10.900.000
KS-Tabungan Simamas	25.100.000	23.200.000
KS-Tabungan Simapan	100.000	100.000
PPh Pasal 21	5.868.462	8.862.981
PPh Pasal 4(2) Bunga Tabungan	997.799	1.113.834
PPh Pasal 4(2) Bunga Deposito	13.745.585	13.178.825
BPJS Kesehatan	6.326.170	6.211.300
Iuran Jamsostek	3.614.352	334.060
PPh Pasal 23 Perusahaan	12.058	13.889
Titipan nasabah	19.958.333	14.948.234
Kewajiban Segera Lainnya	550.000	650.000
Titipan Nas- Setoran tdk teridentifikasi	2.953.000	1.010.000
Titipan Nas- Lainnya	20.021.608	122.294.986
Jumlah Liabilitas Segera	127.119.544	220.390.286

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PT. BPR LUMBUNGARTHA MUNTILANINDO
Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Des 2025	31 Des 2024
12. Utang Bunga		
Akun ini terdiri dari:		
Utang Bunga	42.822.703	34.551.066
Jumlah Utang Bunga	42.822.703	34.551.066
13. Simpanan		
Akun ini terdiri dari:		
<u>Tabungan</u>		
Tabungan Umum	3.378.100.918	3.706.953.960
Tabungan Simapan	141.500.000	107.600.000
Tabungan Simamas	976.200.000	1.213.500.000
Jumlah Tabungan	4.495.800.918	5.028.053.960
<u>Deposito Berjangka</u>		
Deposito 1 Bulan	2.471.040.838	1.841.377.478
Deposito 3 Bulan	2.972.000.000	3.482.000.000
Deposito 6 Bulan	3.530.515.639	3.283.394.724
Deposito 12 Bulan	8.040.163.898	5.226.179.783
Deposito Berlian	25.500.000	-
Jumlah Deposito Berjangka	17.039.220.375	13.832.951.985
Jumlah Simpanan	21.535.021.293	18.861.005.946
14. Liabilitas Imbalan Kerja		
Akun ini terdiri dari:		
Liabilitas Imbalan Kerja	193.352.386	208.631.993
Jumlah Liabilitas Imbalan Kerja	193.352.386	208.631.993
15. Liabilitas Lainnya		
Akun ini terdiri dari:		
Titipan Bonus Lubero	554.371	554.371
Titipan Cadangan Pendidikan	3.746.057	24.656.357
Cadangan Simamas	41.354.000	44.610.000
Jumlah Liabilitas Lainnya	45.654.428	69.820.728
16. Modal Saham		
Akun ini terdiri dari:		
Modal Dasar	10.000.000.000	10.000.000.000
Modal Belum Disetor	(2.600.000.000)	(2.600.000.000)
Jumlah Modal Sudah Disetor	7.400.000.000	7.400.000.000

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**PT. BPR LUMBUNGARTHA MUNTILANINDO**

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Des 2025	31 Des 2024
17. Saldo Laba		
Akun ini terdiri dari:		
Cadangan Umum	708.477.222	708.477.222
Cadangan Tujuan	500.000.000	500.000.000
Laba/Rugi Tahun Lalu	(545.464.374)	812.694.427
Laba Tahun Berjalan	(202.433.212)	(1.358.158.802)
Jumlah Saldo Laba	460.579.635	663.012.846
18. Pendapatan Bunga		
Akun ini terdiri dari:		
Pendapatan Bunga Penempatan Pada Bank Lain		
Giro	13.009.827	34.417.912
Tabungan	14.537.962	26.201.236
Deposito	142.218.002	256.812.854
Pendapatan Bunga Atas Kredit Yang Diberikan		
Kredit	3.036.966.605	2.479.379.949
Pendapatan Komisi dan Provisi		
Provisi dan Administrasi	88.948.715	53.247.112
Jumlah Pendapatan Bunga	3.295.681.110	2.850.059.063
19. Pendapatan Lainnya		
Akun ini terdiri dari:		
Denda Pinjaman	40.033.290	39.825.006
Penerimaan Kredit hapus buku	176.885.000	314.219.700
Pemulihan CKPN - Kredit	1.687.715.992	29.307.858
Administrasi Tabungan	34.961.333	34.036.129
Administrasi Lainnya	5.930.000	5.820.000
Pend. Lain-Lain	321.289.981	337.051.601
Fee Notaris	12.379.265	9.311.487
Selisih Lebih Kas	93.680	193.926
Pendapatan lainnya- Deposito	6.264.120	3.050.235
Jumlah Pendapatan Lainnya	2.285.552.661	772.815.942
20. Beban Bunga		
Akun ini terdiri dari:		
Tabungan	94.275.936	96.290.833
Deposito	822.679.177	836.080.461
Lainnya (LPS)	36.660.947	37.668.730
Jumlah Beban Bunga	953.616.060	970.040.024

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**PT. BPR LUMBUNGARTHA MUNTILANINDO**

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Des 2025	31 Des 2024
21. Beban Kerugian Restrukturisasi Kredit		
Akun ini terdiri dari:		
Kerugian Restrukturisasi Kredit	54.684.857	-
Jumlah Beban Kerugian Restrukturisasi Kredit	54.684.857	-
22. Beban Kerugian Penurunan Nilai		
Akun ini terdiri dari:		
Penyisihan dan Penghapusan Aset Produktif Kredit Yang Diberikan	1.533.682.274	900.135.157
Jumlah Beban Kerugian Penurunan Nilai	1.533.682.274	900.135.157
23. Beban Pemasaran		
Akun ini terdiri dari:		
Promosi dan Edukasi	8.762.260	17.155.500
Jumlah Beban Pemasaran	8.762.260	17.155.500
24. Beban Administrasi dan Umum		
Akun ini terdiri dari:		
Beban Tenaga Kerja		
Gaji dan Upah	1.812.842.565	1.590.696.716
Honorarium	274.500.000	267.201.105
Lainnya	253.332.459	238.911.633
Beban Pendidikan		
Pendidikan dan Pelatihan	31.912.000	66.239.775
Beban Sewa		
Gedung	258.583.335	220.375.000
Kendaraan	193.503.054	178.981.626
Lainnya	28.615.949	14.426.620
Beban Penyusutan		
Penyusutan Aset Tetap	17.761.015	21.591.085
Penyusutan Aset Tidak Berwujud	-	5.416.675
Beban Pemeliharaan dan Perbaikan		
Gedung	11.155.500	1.976.000
Kendaraan	17.986.380	16.747.601
Instal	44.891.753	68.516.301
Komputer	3.838.420	11.382.500
Peralatan	3.465.879	5.586.300
Lainnya	88.500	1.850.000

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PT. BPR LUMBUNGARTHA MUNTILANINDO

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Des 2025	31 Des 2024
24. Beban Administrasi dan Umum (Lanjutan)		
Beban Barang dan Jasa		
Bahan Bakar dan Oli	45.586.296	38.293.587
Listrik, Telepon, Air, Gas	68.543.307	76.870.516
Barang Cetak dan ATK	22.837.846	18.523.373
Beban Service	-	-
Beban Materai dan Perangko	5.356.638	5.466.530
Beban Surat Kabar	16.000	903.000
Beban Perjalanan Dinas	8.581.400	4.534.950
Lainnya	38.232.983	43.839.300
Beban Pajak		
PBB	490.903	490.903
Pajak Kendaraan	1.807.000	1.358.000
Pajak Reklame	802.679	786.940
Pajak Lainnya	4.565.627	53.483.175
Jumlah Beban Administrasi dan Umum	3.149.297.488	2.954.449.211
25. Beban Operasional Lainnya		
Akun ini terdiri dari:		
Beban Iuran OJK	11.650.988	12.485.108
Beban Adm Bank Lain	2.504.068	5.407.885
Beban Keamanan	1.800.000	1.800.000
Beban Konsumsi	8.078.455	9.381.760
Beban Hadiah Simamas	15.845.979	19.238.886
Lainnya	48.216.315	71.430.242
Jumlah Beban Operasional Lainnya	88.095.805	119.743.881
26. Pendapatan dan (Beban) Non-Operasional		
Akun ini terdiri dari:		
Pendapatan Non-Operasional:		
Keuntungan Penjualan Aset Tetap dan Inventaris	29.700.000	-
Lainnya	-	250.000
Jumlah Pendapatan Non Operasional	29.700.000	250.000
Beban Non-Operasional:		
Lainnya	25.228.240	19.760.034
Jumlah Beban Non Operasional	25.228.240	19.760.034
Jumlah Pendapatan dan (Beban) Non Operasional	4.471.760	(19.510.034)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**PT. BPR LUMBUNGARTHA MUNTILANINDO**

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Des 2025	31 Des 2024
27. Taksiran Pajak Penghasilan		
Laba Sebelum Pajak	(202.433.212)	(1.358.158.802)
Penghasilan Kena Pajak	(202.433.212)	(1.358.158.802)
Jumlah Laba (Rugi) Fiskal	(202.433.000)	(1.358.158.000)
Pendapatan Bruto		
Taksiran Pajak Penghasilan		
Peredaran bruto yang mendapatkan fasilitas:	-	-
Peredaran bruto yang tidak mendapat fasilitas:	-	-
Taksiran Pajak Penghasilan kurang bentuk	-	-
Taksiran Pajak BPR	-	-

Sesuai peraturan perundangan yang berlaku, Ditjen Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas pajak perusahaan dan tidak tertutup kemungkinan hasil pemeriksaan berbeda dengan saldo taksiran pajak tahun 2025 dan 2024 tersebut.

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

PT. BPR LUMBUNGARTHA MUNTILANINDO
ANALISA LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

1. Perkembangan Usaha

a. Total asset

Total aset PT. BPR Lumbungartha Muntilanindo per 31 Desember 2025, mengalami peningkatan dengan rincian sebagai berikut :

Total asset tahun 2025	29.804.549.990
Total asset tahun 2024	27.457.412.865
Kenaikan	2.347.137.125
Persentase Peningkatan (Penurunan)	8,55%

b. Penghimpunan Dana

Jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun PT. BPR Lumbungartha Muntilanindo per 31 Desember 2025, yaitu deposito dan tabungan dengan rincian sebagai berikut :

	Deposito	Tabungan
Dana yang dihimpun tahun 2025	17.039.220.375	4.495.800.918
Dana yang dihimpun tahun 2024	13.832.951.985	5.028.053.960
Peningkatan (Penurunan)	3.206.268.390	(532.253.042)
Persentase Peningkatan (Penurunan)	23,18%	(10,59%)

c. Pemberian kredit

Jumlah pinjaman yang diberikan PT. BPR Lumbungartha Muntilanindo per 31 Desember 2025, mengalami peningkatan, dengan rincian sebagai berikut:

Pinjaman yang diberikan tahun 2025	24.672.321.325
Pinjaman yang diberikan tahun 2024	20.561.301.476
Peningkatan	4.111.019.849
Persentase Peningkatan	19,99%

2. Permodalan

a. Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (Rincian Terlampir)

Bank akan selalu memenuhi ketentuan Bank Indonesia termasuk dalam bidang permodalan sehingga apabila terdapat perubahan ketentuan dalam perbankan Indonesia, manajemen akan segera menyusun perencanaan untuk memenuhi ketentuan tersebut. Bilamana bank tidak memenuhi rasio kecukupan modal (CAR) maka Bank Indonesia dapat mengambil tindakan yang memengaruhi operasi bank

b. Ratio Kecukupan Modal (Rincian Terlampir)

Bank diwajibkan memenuhi persyaratan ratio kewajiban penyediaan modal (KPMM) atau Capital Adequacy Ratio (CAR) yang ditetapkan Bank Indonesia, yang mempertimbangkan secara kuantitatif seperti aset, kewajiban dan akun of balance sheet tertentu juga pertimbangan secara kualitatif tentang komponen dan resiko tertimbang.

3. Analisa Likuiditas

a. Cash Ratio

Alat Likuid

Kas	102.044.900
Penempatan pada bank lain (giro dan tabungan)	3.756.309.752
Jumlah	3.858.354.652

Hutang Lancar

Liabilitas Segera	127.119.544
Tabungan	4.495.800.918
Deposito berjangka	17.039.220.375
Jumlah	21.662.140.837
Cash Ratio	17,81%

b. Rasio total kredit yang diberikan terhadap dana yang diterima (*Loan to Debt Ratio*)

Loan

Jumlah Kredit Yang Diberikan	24.864.652.803
------------------------------	----------------

Debt

Tabungan	4.495.800.918
Deposito berjangka	17.039.220.375
Jumlah	21.535.021.293
Loan to debt Ratio	115,46%

4. a. Rasio Rentabilitas

Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)

Beban operasional	5.788.138.744
Pendapatan operasional	5.581.233.771
BOPO	103,71%

b. Batas maksimum pemberian kredit

Modal inti	6.313.342.733
Modal pelengkap	68.658.405
Jumlah Modal	6.382.001.138

Pihak terkait (10%)	638.200.114
Pihak tidak terkait (20%)	1.276.400.228
Penyertaan BPR dan BPRS Lain (30%)	1.914.600.341

c. Return On Aset (ROA)

Rata-Rata Aset Bulanan

Januari	27.833.804.966
Februari	27.965.265.340
Maret	26.420.320.921
April	25.930.164.495
Mei	25.513.545.284
Juni	25.692.431.655
Juli	27.159.113.554
Agustus	26.473.623.045
September	26.462.833.876
Oktober	27.018.941.823
Nopember	27.127.328.486
Desember	29.804.549.990
Jumlah	323.401.923.434
Rata-Rata Aset	26.950.160.286

Laba Sebelum Pajak (202.433.212)

Return On Aset (ROA) -0,75%

5. Aset Produktif (Rincian terlampir)

Tabel di bawah ini menunjukkan perhitungan kualitas aset produktif bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

PT. BPR LUMBUNGARTHA MUNTILANINDO
PERHITUNGAN AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RESIKO (ATMR)
TANGGAL 31 DESEMBER 2025

Keterangan		31 Desember 2025		
		Nominal Rp	Bobot Risiko %	ATMR Rp
1	Kas	102.044.900	0	-
2	Sertifikat Bank Indonesia		0	-
3	Kredit dengan agunan berupa SBI, tabungan dan deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan, emas dan logam mulia, sebesar nilai terendah antara agunan dan baki debit	-	0	-
4	AYDA yang telah melampaui 1 tahun sejak tanggal AYDA	700.000.000	0	-
5	Giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan serta tagihan lainnya kepada bank lain	4.756.309.752	20	951.261.950
6	Kredit kepada atau yang dijamin oleh bank lain atau Pemerintah Daerah	-	20	-
7	Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dijamin oleh hak tanggungan pertama dengan tujuan untuk dihuni*	17.721.555.547	30	5.316.466.664
8	Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang tidak dijamin oleh hak tanggungan pertama dengan tujuan untuk dihuni*	135.353.259	50	67.676.630
9	Kredit Kendaraan/kapal/motor diikat akta fidusia	210.925.035	70	147.647.525
10	Kredit Kepada Usaha Mikro Kecil*	670.464.305	70	469.325.014
11	Kredit kepada atau yang dijamin oleh:			
	a. Perorangan	-	100	-
	b. Koperasi	-	100	-
	c. Kelompok dan Perusahaan Lainnya	-	100	-
12	Kredit dengan yang telah jatuh tempo atau dengan Kualitas Maca	5.043.528.684	100	5.043.528.684
13	Kredit Jatuh Tempo / Tidak termasuk kriteria diatas	75.030.313	100	75.030.313
14	Aktiva tetap dan inventaris (nilai buku)	31.669.478	100	31.669.478
15	AYDA yang belum melampaui 1 tahun sejak tanggal AYDA	-	100	-
16	Aktiva lainnya setelah tersebut diatas	617.974.818	100	617.974.818
JUMLAH ATMR		30.064.856.091		12.720.581.075

PT. BPR LUMBUNGARTHA MUNTILANINDO
PERHITUNGAN KEBUTUHAN MODAL MINIMUM
TANGGAL 31 DESEMBER 2025

Keterangan	31 Desember 2025	
	Jumlah Setiap komponen Rp	Jumlah Rp
A. MODAL		
1. Modal Inti		
1.1. Modal disetor	7.400.000.000	7.400.000.000
1.2. Agio	-	-
1.3. Disagio -/-	-	-
1.4. Modal Sumbangan	-	-
1.5. Dana setoran modal	-	-
1.6. Cadangan umum	708.477.222	708.477.222
1.7. Cadangan tujuan	500.000.000	500.000.000
1.8. Laba ditahan	-	-
1.9. Laba tahun-tahun lalu	(545.464.376)	(545.464.376)
1.10. Rugi tahun-tahun lalu -/-		-
1.11. Laba (Rugi) tahun berjalan	(202.433.212)	(202.433.212)
1.12. Rugi tahun berjalan -/-	-	-
1.13. Sub total	7.860.579.634	-
1.14. Goodwill		-
1.15. AYDA lebih dari 5 tahun	700.000.000	(700.000.000)
1.16. kekurangan PPAP -/-	847.236.901	(847.236.901)
1.17. Jumlah Modal Inti		6.313.342.733
2. Modal Pelengkap		
2.1. Cadangan revaluasi aktiva tetap	-	-
2.2. Penyisihan penghapusan aktiva produktif umum (maksimum 1,25% ATMR)	159.007.263	68.658.405
2.3. Modal kuasi/modal pinjaman	-	-
2.4. Pinjaman subordinasi (maksimum 50% dari modal inti)	-	-
2.5. Jumlah Modal Pelengkap	159.007.263	
2.6. Jumlah modal pelengkap yang diperhitungkan (maksimum 100% dari modal inti)		68.658.405
3. Jumlah modal (1.13 + 2.6)		6.382.001.138
B. MODAL MINIMUM (12% X ATMR)	12.720.581.075	1.526.469.729
C. KELEBIHAN MODAL		4.855.531.409
D. RASIO MODAL = $\frac{\text{Jumlah Modal}}{\text{ATMR}}$ x 100%		50,17%

PT. BPR LUMBUNGARTHA MUNTILANINDO
KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF
TANGGAL 31 DESEMBER 2025

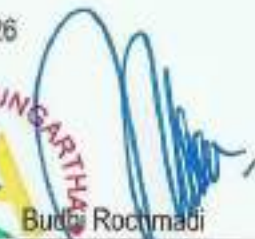
Keterangan	Lancar Rp	Dalam Perhatian Khusus - Rp	Kurang Lancar Rp	Diragukan Rp	Macet Rp	Jumlah Rp
1. Aktiva Produktif						
a. Kredit yang diberikan	13.100.594.572	4.590.344.780	617.330.032	713.114.511	5.843.268.908	24.864.652.803
b. Surat-surat berharga	-	-	-	-	-	-
c. Penempatan pada bank lain	4.756.309.752	-	-	-	-	4.756.309.752
Jumlah aktiva produktif	17.856.904.324	4.590.344.780	617.330.032	713.114.511	5.843.268.908	29.620.962.555
2. Jumlah aktiva produktif yang diklasifikasikan		0%	50%	75%	100%	
3. Nilai agunan kredit		-	308.665.016	534.835.883	5.843.268.908	6.686.769.807
4. Kredit Back to Back		4.235.214.813	611.216.122	697.491.513	4.003.475.374	9.547.397.822
5. Dasar Perhitungan PPAPWD	273.222.172					273.222.172
6. Prosentase PPAPWD	12.827.372.400	355.129.967	6.113.910	15.622.998	1.839.793.534	15.044.032.809
7. Jumlah PPAPWD	0,50%	3,00%	10,00%	50,00%	100,00%	
8. Jumlah PPAPWD yang telah dibentuk	64.136.862	10.653.899	611.391	7.811.499	1.839.793.534	1.923.007.185
9. Jumlah lebih (kurang) pembentukan PPAP						-
10. Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap Aktiva Produktif (2:1) x 100%						22,57%
11. Rasio PPAP terhadap PPAPWD (8:7) x 100%						100,00%
12. Prosentase kolektibilitas Kredit	52,69%	18,46%	2,48%	2,87%	23,50%	100,00%
13. Rasio NPL Bruto						28,85%
14. CKPN			21.714.946	55.479.770	800.782.312	
15. KYD Khusus - CKPN Khusus			595.615.086	657.634.741	5.042.486.596	6.295.736.423
16. Rasio NPLs (Netto)						25,32%

LAMPIRAN

PT. BPR LUMBUNGARTHA MUNTILANINDO
JURNAL KOREKSI TAHUN 2025

INDEX	KETERANGAN	DEBET	KREDIT
1.	Akm Peny Inventaris Kantor Beban Penyusutan Aset Tetap <i>(Jurnal Koreksi atas lebih beban akumulasi penyusutan inventaris kantor)</i>	215.132	215.132
JUMLAH		215.132	215.132

Muntilan, Februari 2026

	
Fitri Adi Nugroho	Budi Rochmadi
Direktur Utama	Direktur Yang Membawahkan Pungsi Kepatuhan

